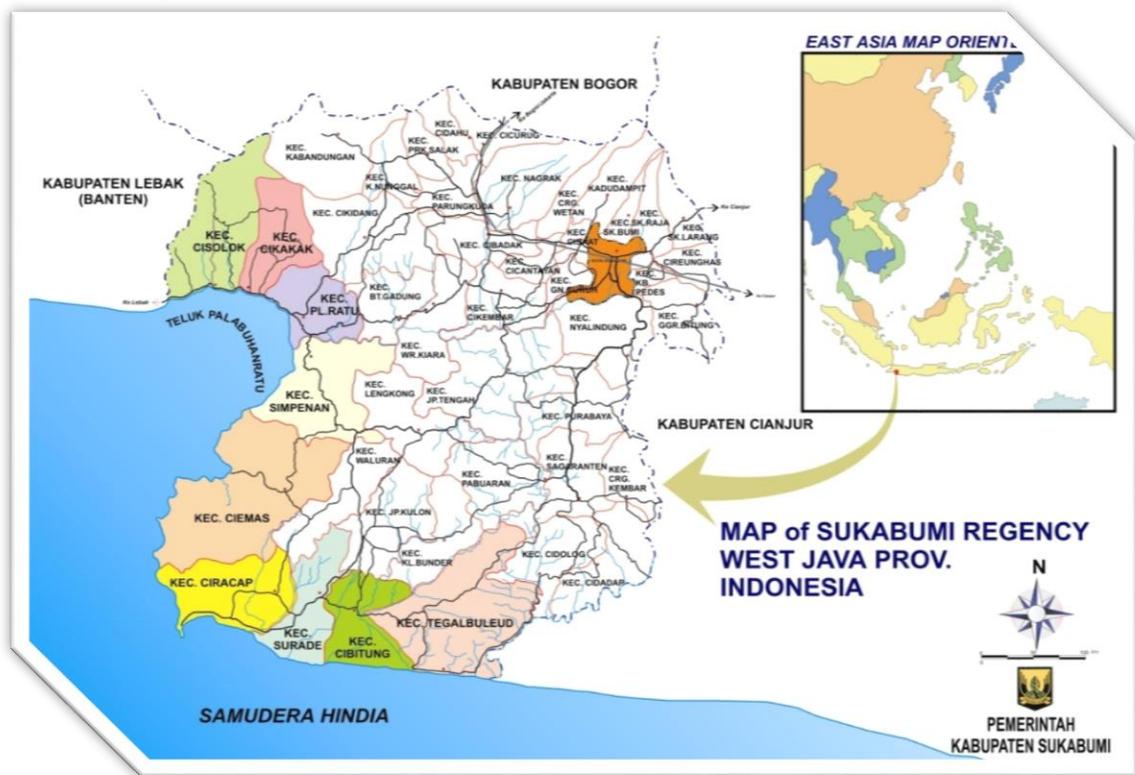




RENCANA STRATEGIS 2016 – 2021



**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA (DPMD)
KABUPATEN SUKABUMI**

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Puji Syukur Kehadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat, berkat dan hidayahNya kami dapat menyelesaikan perubahan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-2021.

Dalam Kepemerintahan yang baik, Instansi Pemerintah harus dapat mempertanggungjawabkan Rencana Strategis yang akan diselenggarakan tahun berjalan serta tahun yang akan datang. Untuk itu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa telah menyusun Rencana Kerja Strategis sebagai media pertanggungjawaban kinerja selama Tahun 2016-2021 berdasarkan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan yang dimiliki.

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa diharapkan dapat memberikan kontribusi yang positif terutama dalam mendorong kinerja dan keberdayaan sumber daya aparatur dalam melakukan tata kelola pemerintahan yang baik, dengan tetap konsisten untuk menerima umpan balik demi perbaikan dan peningkatan kinerja.

Kepada semua pihak yang telah mengerahkan tenaga dan pikirannya untuk menyusun Rencana Strategis ini, kami sampaikan ucapan terima kasih.

Palabuhanratu, 30 Desember 2016

Kepala Dinas,



ADE SETIAWAN, S.IP

Pembina Tk. I

NIP. 19630603 198503 1 021

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1 Latar Belakang.....	I-1
1.2 Landasan Hukum.....	I-2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	I-7
1.3.1 Maksud	I-7
1.3.2 Tujuan.....	I-7
1.4 Sistematika	I-8
BAB II GAMBARAN PELAYANAN BPMPD	II-1
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	II-1
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	II-5
2.2.1 Sumber Daya Aparatur	II-5
2.2.2 Sarana Prasarana Penunjang	II-6
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	II-8
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	II-11
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	III-1
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	III-1
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	III-3

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra BPMPD Provinsi Jawa Barat	III-4
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkup Strategis	III-8
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis	III-12
BAB IV TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN	IV-1
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	IV-1
4.2 Strategi dan Kebijakan	IV-7
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF	V-1
BAB VI INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD	VI-1
BAB VII PENUTUP	VII-1

DAFTAR TABEL

- Tabel 2.1 Kondisi Pegawai BPMPD Kabupaten Sukabumi Tahun 2016.
- Tabel 2.2 Kondisi Sarana Prasarana BPMPD Kabupaten Sukabumi Tahun 2016.
- Tabel 2.3 Review Pencapaian Kinerja Pelayanan BPMPD Kabupaten Sukabumi 2011 – 2015.
- Tabel 2.4 Anggaran dan Realisasi Pendanaan BPMPD Kabupaten Sukabumi 2011 – 2015.
- Tabel 3.1 Telaahan Renstra BPMPD Provinsi Jawa Barat.
- Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BPMPD Kabupaten Sukabumi 2016-2021.
- Tabel 4.2 Strategi dan Kebijakan BPMPD Kabupaten Sukabumi.
- Tabel 5.1 Daftar Rencana Program Prioritas dan Kebutuhan Pendanaan BPMPD Kabupaten Sukabumi 2016-2021.
- Tabel 5.2 Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif BPMPD Kabupaten Sukabumi.
- Tabel 6.1 Indikator Kinerja BPMPD yang mengacu kepada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-2021

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Sukabumi.

Gambar 3.2 Peta Rencana Struktur Ruang Kabupaten Sukabumi.

Gambar 3.3 Peta Tipologi Desa berdasarkan IDM Kabupaten Sukabumi.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 menyebutkan bahwa Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan desa (DPMD) Kabupaten Sukabumi tahun 2016 - 2021 merupakan Renstra untuk kurun waktu 5 (lima) tahun yang akan datang, yaitu tahun 2016 - 2021 yang memperhitungkan potensi, peluang dan ancaman yang ada atau mungkin timbul. Renstra mengandung Tujuan, Sasaran dan Strategi (cara untuk mencapai tujuan dan sasaran) yang berfungsi menjabarkan RPJMD Kabupaten Sukabumi tahun 2016 - 2021. Penyusunan Renstra telah dilaksanakan secara partisipatif dengan melibatkan unsur Pimpinan, Pejabat kunci dan Staf yang mampu memberikan masukan serta pemangku kepentingan lainnya. Selain itu, penyusunan Renstra telah memperhatikan RPJMD Pemerintah Kabupaten Sukabumi. Dengan demikian, Renstra DPMD Kabupaten Sukabumi tahun 2016 - 2021 telah selaras dengan RPJMD Kabupaten Sukabumi tahun 2016 - 2021.

Naskah Renstra DPMD Kabupaten Sukabumi disusun dengan maksud menyajikan gambaran rinci tentang rencana kerja lima tahunan, terhitung tahun 2016 sampai dengan tahun 2021. Renstra DPMD Kabupaten Sukabumi ini disusun sebagai penjabaran Visi dan Misi

pasangan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi terpilih tahun 2016-2021, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2016 – 2021.

Renstra DPMD Kabupaten Sukabumi merupakan dokumen perencanaan untuk periode 2016-2021. Dokumen ini ditetapkan dengan tujuan untuk memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi seluruh komponen Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukabumi dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan organisasi, berdasarkan tujuan dan sasaran yang disepakati bersama sehingga seluruh daya dan upaya yang dilakukan oleh masing-masing pelaku pembangunan bersinergis, koordinatif dan melengkapi satu dengan lainnya di dalam satu pola sikap dan pola tindak.

Renstra ini disusun secara sistematis dan berkelanjutan dari serangkaian kegiatan berupa rencana program dan kegiatan untuk kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, yang akan dijadikan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan DPMD Kabupaten Sukabumi.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
11. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Reublik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah

- Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
 21. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015- 2019, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pembentukan dan Teknik Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 2 Seri D) jo. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pembentukan dan Teknik Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2003 No 20 Seri D);
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 25 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 88);
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64);
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 Nomor 25 Seri E);
28. Peraturan Daerah Nomor 25 tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2012 Nomor 25; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 21);

29. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 13 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Sukabumi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2009 Nomor 13);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukabumi 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2016 Nomor 4);
31. Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukabumi (Berita Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2016 Nomor 58).

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Penyusunan Renstra DPMD Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-2021 dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan jangka menengah yang menjabarkan RPJMD Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-2021 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diamanatkan kepada DPMD Kabupaten Sukabumi sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukabumi.

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Renstra DPMD Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-2021 adalah :

1. Menjabarkan visi, misi dan program kepala daerah terpilih sekaligus menetapkannya menjadi visi, misi dan program dan kegiatan DPMD Kabupaten Sukabumi;
2. Untuk dijadikan landasan/pedoman dalam penyusunan Renja DPMD;

3. Penguatan peran para *stakeholders* dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah;
4. Sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan DPMD Kabupaten Sukabumi.

1.4 Sistematika

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DPMD

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

4.2 Strategi dan Kebijakan

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

BAB VI INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

BAB VII PENUTUP



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA (DPMD)

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

DPMD dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2012 Nomor 7; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 45) yang dijabarkan dengan Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukabumi. DPMD merupakan unsur pendukung tugas Bupati yang melaksanakan urusan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

DPMD mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Adapun yang menjadi fungsi DPMD yaitu :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- c. Pemantauan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas kesekretariatan; Administrasi Pemerintahan Desa; Keuangan dan Aset Desa; Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa; dan prasarana Desa; dan Pemberdayaan Masyarakat;
- d. Pembinaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas di kesekretariatan; Administrasi Pemerintahan Desa; Keuangan dan Aset Desa; pembangunan Sarana dan Prasarana Desa; dan Pemberdayaan Masyarakat;



- e. Penyelenggaraan penataan Desa;
- f. Penyelenggaraan fasilitasi kerjasama antar Desa;
- g. Pembinaan dan penyelenggaraan administrasi pemerintahan Desa;
- h. Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan desa dan lembaga adat tingkat daerah;
- i. Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan desa dan lembaga adat tingkat desa;
- j. Pembinaan administrasi di lingkungan Dinas;
- k. Pembinaan penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Dinas;
- l. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- m. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
- n. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan
- o. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas.

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sukabumi, sebagaimana terlampir dalam Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2016, sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
 - 2. Sub Bagian Keuangan
 - 3. Sub bagian Perencanaan dan Evaluasi
- c. Bidang Administrasi Pemerintahan Desa, membawahkan
 - 1. Seksi Administrasi Desa
 - 2. Seksi Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa
 - 3. Seksi Evaluasi Perkembangan Desa
- d. Bidang Keuangan dan Aset Desa membawahkan :
 - 1. Seksi Perencanaan Keuangan dan Aset Desa
 - 2. Seksi Penatausahaan Keuangan dan Aset Desa
 - 3. Monitoring Evaluasi Keuangan dan Aset Desa



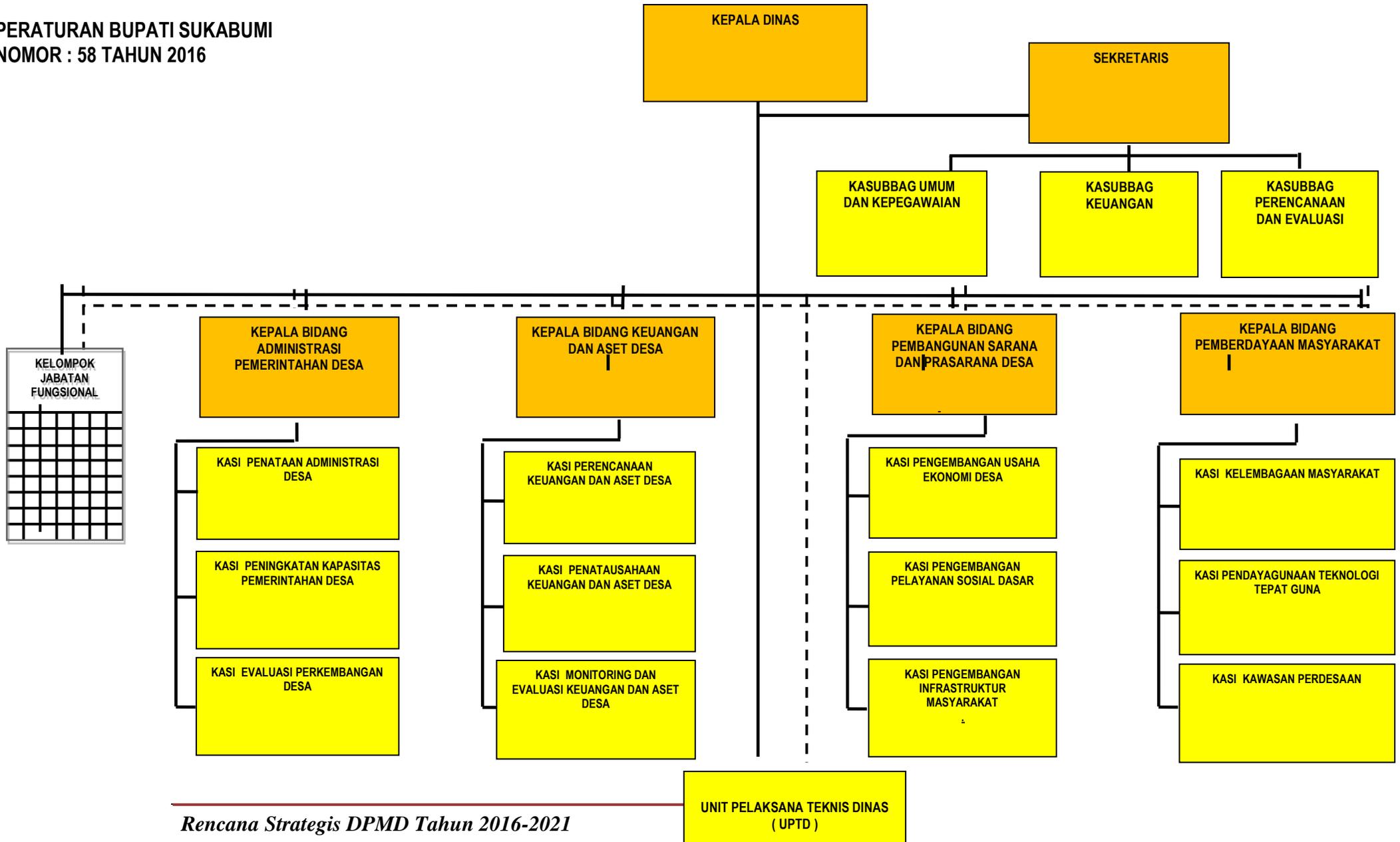
- e. Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa, membawahkan :
 - 1. Seksi Pengembangan Usaha Ekonomi Desa
 - 2. Seksi Pengembangan Pelayanan Sosial Dasar
 - 3. Seksi Pengembangan Infrastruktur Masyarakat
- f. Bidang Pemberdayaan Masyarakat, membawahkan:
 - 1. Seksi Kelembagaan Masyarakat
 - 2. Seksi Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna
 - 3. Seksi Kawasan Pedesaan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional



**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN SUKABUMI**

DPMD Kabupaten Sukabumi

**PERATURAN BUPATI SUKABUMI
NOMOR : 58 TAHUN 2016**





2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1 Sumber Daya Aparatur

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor Nomor 58 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukabumi yang berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2016 Nomor 7; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 45), dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, DPMD pada saat ini didukung pegawai sebanyak 46 orang, terdiri dari 35 PNS dan 11 TKS dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.1
Kondisi Pegawai DPMD Kabupaten Sukabumi
Tahun 2016/2017

No	Uraian	Laki-Laki	Perempuan	Total
1	Jumlah Pegawai			
	- PNS	27	8	35
	- CPNS	-	-	-
	- TKS	10	1	11
	Jumlah	37	9	46
2	Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan:			
	a. Golongan IV	4	1	5
	b. Golongan III	17	6	23
	c. Golongan II	6	1	7
	d. Golongan I	-	-	-
	Jumlah	25	8	33
3	Jumlah Pegawai berdasarkan Jabatan :			
	a. Kepala Dinas	1	-	1
	b. Sekretaris	1	-	1
	c. Kepala Bidang	3	1	4
	d. Kepala Sub. Bagian	1	3	4
	e. Kepala Seksi	11	1	12
	f. Fungsional Umum	11	3	14
	Jumlah	28	8	36



4	Jumlah pegawai yang telah mengikuti Pendidikan Penjejang Terakhir :			
	a. Diklatpim II	1	-	1
	b. Diklatpim III	4	1	5
	c. Diklatpim IV/Adum	7	4	11
	Jumlah	12	5	17
5	Jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan :			
	a. Strata 2 (Magister)	8	2	10
	b. Strata 1 (Sarjana)	12	3	15
	c. Diploma	-	-	-
	d. SLTA	7	3	10
	e. SLTP	-	-	-
	f. SD	-	-	-
	Jumlah	27	8	35

Sumber : Subag. Kepegawaian dan Umum

2.2.2 Sarana Prasarana Penunjang

Sarana prasarana penunjang yang dimiliki DPMD Kabupaten Sukabumi, berdasarkan kondisi akhir bulan Desember 2016 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2
Kondisi Sarana Prasarana DPMD Kabupaten Sukabumi
Tahun 2016

No	Sarana Prasarana	Banyak (Unit)	Kondisi	
			Baik	Rusak/ Kurang Baik
1	Gedung/Kantor	1	1	-
2	Kendaraan Roda 4	7	7	-
3	Kendaraan roda 2	24	18	6
4	Mesin Ketik	15	15	-
5	Mesin Fotocopy	2	2	-
6	Rak Besi/Metal	1	1	-
7	Filling Besi/Metal	16	16	-



8	Lemari Kayu	8	8	-
9	Alat Penghancur Kertas	12	12	-
10	Papan Pengumuman	1	1	-
11	White Board	5	5	-
12	Overhead Projektor	5	5	-
13	Zice	1	1	-
14	Meja Rapat	3	3	-
15	Meja Tulis	41	41	-
16	Kursi Tamu	11	11	-
17	Kursi Putar	4	4	-
18	Kursi Lipat	57	57	-
19	Meja Komputer	4	4	-
20	Meja Biro	7	7	-
21	Sofa	1	1	-
22	Jam Dinding	13	13	-
23	Mesin Penghisap Debu	1	1	-
24	Mesin Potong Rumput	1	1	-
25	Air Conditioner	22	22	-
26	Alat Rumah Tangga Lainnya	62	62	-
27	Alat Pemadam Kebakaran	1	1	-
28	Komputer PC	8	8	-
29	Laptop	10	10	-
30	Note Book	33	33	-
31	Printer	11	11	-
32	Server	1	1	-
33	Meja dan Kursi Kerja	142	142	-
34	Alat Studio	28	28	-
35	Alat Komunikasi	12	12	-

Sumber : Subag. Kepegawaian dan Umum (Pengelola barang)



2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Indikator Kinerja pelayanan DPMD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sukabumi mempunyai fungsi, sebagai berikut :

1. Penyusunan Rencana dan Program kerja di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
2. Perumusan dan penyusunan kebijakan teknis di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
3. Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan tugas di Bidang Kesekretariatan, Bidang Pemerintahan Desa, Bina Pemberdayaan Usaha Ekonomi Desa, Bina Kesewadayaan dan Kelembagaan Masyarakat dan Bina Pengembangan Desa;
4. Pembinaan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian, Keuangan, Perlengkapan dan Kearsipan;
5. Pelaksanaan Koordinasi dan Kerjasama dengan Unit Kerja lain;
6. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi hasil Pelaksanaan Tugas;
7. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas.

Sesuai dengan RPJMD Kabupaten Sukabumi Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa semua target indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukabumi Tahun 2011 – 2015, sebagaimana disajikan pada tabel 2.3 yaitu sebagai berikut :



Tabel 2.3
Review Pencapaian Kinerja Pelayanan DPMD
Kabupaten Sukabumi Tahun 2011-2015

No	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi Capaian Kinerja					Capaian Target Akhir Renstra	Capaian s/d 2015 terhadap 2015 (%)
			2011	2012	2013	2014	2015		
1.	Jumlah Desa yang mendapatkan Alokasi Dana Desa	381	363	363	381	381	381	381	100%
2.	Jumlah Lembaga Masyarakat Desa	381	363	363	381	381	381	381	100%
3.	Jumlah Lembaga Ekonomi Mikro Pedesaan	390	84	84	83	172	102	525	135%
4.	Jumlah Kelompok Binaan LPM	14				7	10	17	121%
5.	Pembangunan Pasar Desa	57	7	17	5	3	7	39	68%

Sumber : Subag Perencanaan dan Program

Sedangkan dalam pencapaian kinerja pelayanan sebagaimana tersebut di atas (**Tabel 2.3**), diakomodir dalam pendanaan yang bersumber dari APBD II, APBD I dan APBN. Anggaran Belanja Daerah DPMD Kabupaten Sukabumi tahun 2011-2015 telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sukabumi dan dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran. Perkembangan anggaran dan realisasi belanja daerah menurut kelompok belanja dari tahun 2011-2015, sebagaimana tercantum dalam **Tabel 2.4** berikut :



Tabel 2.4
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pada DPMD
Kabupaten Sukabumi Tahun 2011 s.d 2015

Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi & Anggaran Pada Tahun				
	2011 (000)	2012 (000)	2013 (000)	2014 (000)	2015 (000)	2011 (000)	2012 (000)	2013 (000)	2014 (000)	2015 (000)	2011 (%)	2012 (%)	2013 (%)	2014 (%)	2015 (%)
BELANJA DAERAH															
a. Belanja tidak langsung	2.097.8 79	2.482.2 11	2.382.8 97	2.179.9 46	2.443.5 96	2.033. 533	2.202.7 08	2.311.0 06	2.137.4 93	2.326.9 35	96,9 3	88,74 8	96,9 8	98,05 8	95,23
b. Belanja langsung	4.461.8 14	8.447.5 38	8.574.2 68	11.033. 982	10.288. 482	4.157. 541	8.277.2 94	8.490.8 68	10.948. 381	10.155. 087	93,1 8	97,98 3	99,0 3	99,22	98,70
Total	6.559.6 93	10.929. 749	10.957. 164	13.213. 927	12.732. 077	6.191. 074	10.480. 002	10.801. 874	13.085. 874	12.482. 022	94,3 8	95,89 8	98,5 8	99,03	98,04

Sumber : Subbag Keuangan DPMD Kabupaten Sukabumi



2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

DPMD dalam menjalankan tugas dan fungsinya di bidang pemberdayaan masyarakat tentunya tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi baik internal maupun eksternal, akan tetapi permasalahan-permasalahan yang dihadapi tersebut harus dipandang sebagai suatu tantangan dan peluang dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan pelayanan pada DPMD Kabupaten Sukabumi.

Berdasarkan analisis terhadap permasalahan internal maupun eksternal, dalam hal ini dengan menggunakan metode SWOT Analisis. Dalam analisis SWOT Lingkungan internal meliputi *Strength* (Kekuatan) dan *Weaknesses* (Kelemahan). Sedangkan Lingkungan eksternal meliputi *Opportunity* (Peluang) dan Ancaman *Threats* (ancaman). Adapun Masing-masing kondisi lingkungan internal dan eksternal antara lain sebagai berikut :

A. Analisis Lingkungan Internal

Berdasarkan analisis yang dilakukan, pada Lingkungan Internal, terdapat Faktor kekuatan dan faktor kelemahan. Karena bersifat internal, semua faktor kekuatan dan faktor kelemahan ini berada dalam jangkauan kapasitas DPMD untuk mengubah atau mempengaruhinya.

1. Unsur Kekuatan, antar lain terdiri dari :

- a. Adanya kewenangan di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;
- b. Adanya pegawai yang memiliki komitmen tinggi dan berpengalaman dalam tugas/pekerjaan;
- c. Adanya sistem administrasi dan manajemen pemerintahan desa yang sudah baku;
- d. Adanya panduan dan sistem mekanisme kerja;
- e. Tersedianya anggaran



2. Unsur Kelemahan, antara lain terdiri dari :

- a. Terlalu berorientasi pada anggaran;
- b. Belum tersedianya sistem informasi data;
- c. Kurangnya sarana dan prasarana untuk menunjang operasional kerja;
- d. Kurangnya tenaga fungsional

B. Analisis Lingkungan Eksternal

Sama dengan analisis lingkungan internal, maka pada analisis lingkungan eksternal juga terdapat dua faktor utama, yakni faktor peluang dan faktor ancaman. Karena bersifat eksternal, sebagian besar dari faktor peluang dan ancaman berada di luar jangkauan pemerintah daerah untuk mempengaruhinya. Atau paling tidak, kemampuan pemerintah daerah untuk mempengaruhi faktor peluang dan ancaman lebih terbatas.

1. Faktor Peluang, antara lain terdiri dari :

- a. Terbitnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang akan semakin mendorong terwujudnya tata kelola desa yang demokratis menuju Pembangunan Desa Terpadu;
- b. Potensi masyarakat yang cukup besar untuk bergotong royong dan berswadaya;
- c. Adanya partisipasi pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan;
- d. Adanya komitmen pemerintah kabupaten dalam melaksanakan pembangunan melalui pendekatan partisipatif;
- e. Adanya program-program bantuan dari provinsi dan pusat;
- f. Adanya tuntutan masyarakat akan penyelenggaraan pemerintahan yang baik.



2. Faktor Ancaman, antara lain terdiri dari :

- a. Masih rendahnya kualitas Aparatur Desa dalam implementasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sesuai peraturan perundang-undangan;
- b. Rendahnya kualitas SDM di pedesaan;
- c. Besarnya jumlah keluarga miskin;
- d. Banyaknya infrastruktur desa yang rusak dan belum memadai;
- e. Banyaknya sarana dan prasarana kantor desa yang belum memadai;
- f. Masih banyaknya desa yang berpotensi rendah.

BAB III
ISU-ISU STRATEGIS
BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor Nomor 58 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukabumi. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sukabumi mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan Kebijakan Daerah di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Adapun yang menjadi fungsinya yaitu :

1. Penyusunan rencana dan program kerja di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
2. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
3. Pembinaan, pengendalian dan pengawasan tugas di bidang kesekretariatan, bina pemerintahan desa, bina pemberdayaan usaha ekonomi desa, bina keswadayaan dan kelembagaan masyarakat, dan bina pengembangan desa;
4. Pembinaan dan pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan kearsipan;
5. Pelaksanaan tugas pembantuan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
6. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
7. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan
8. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, DPMD Kabupaten Sukabumi tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi, permasalahan tersebut antara lain :

- 1. Masih Rendahnya Tata Kelola Pemerintahan Desa**, diantaranya dikarenakan oleh masih rendahnya kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa; belum tertibnya manajemen dan tata kelola administrasi desa; Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa yang belum memadai; Penguasaan Manajemen Teknologi Informasi yang masih rendah; belum optimalnya pengelolaan data potensi dan perkembangan desa; Penggalan dan Pengelolaan Pendapatan Asli Desa masih rendah; belum optimalnya pelayanan Pemerintahan Desa.
- 2. Belum Optimalnya Kinerja Kelembagaan Masyarakat dalam Pengembangan Kemandirian Usaha Ekonomi Mikro Perdesaan**, diantaranya dikarenakan oleh masih rendahnya kompetensi sumber daya manusia; kurangnya sarana dan prasarana kelembagaan; kurang berkembangnya kelompok ekonomi produktif di perdesaan; masih kurangnya kelembagaan keuangan di desa yang dapat menyediakan modal usaha; belum bersinerginya antar kelembagaan yang ada di perdesaan; belum optimalnya promosi dan pengembangan Teknologi Tepat Guna (TTG); Lemahnya peran dan fungsi kelembagaan masyarakat dalam melestarikan hasil kegiatan.
- 3. Masih rendahnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa**, diantaranya dikarenakan oleh menurunnya kesadaran masyarakat terhadap swadaya dan gotong royong, kurang berdayanya masyarakat desa dalam pelaksanaan pembangunan; kurangnya motivasi dan kemandirian masyarakat dalam pembangunan desa; proses perencanaan pembangunan partisipatif yang belum optimal.
- 4. Masih adanya Desa yang termasuk kategori Desa tertinggal**, diantaranya dikarenakan oleh belum terpenuhinya kebutuhan infrastruktur desa; kurangnya kajian terhadap status perkembangan desa; penggalan potensi sumber daya desa yang masih rendah; belum terencananya program pembangunan di desa secara baik; masih tingginya ketergantungan masyarakat terhadap program

pembangunan dari pemerintah; belum bersinerginya perencanaan pembangunan di Desa; masih rendahnya kapasitas kader pembangunan desa; masih tingginya angka kemiskinan.

- 5. Belum Optimalnya Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa**, diantaranya dikarenakan oleh bangunan Kantor yang belum representatif; kurangnya sarana dan prasarana kantor; kurangnya Sumber Daya Pegawai Negeri Sipil; masih kurangnya kegiatan yang mendukung pengembangan kompetensi pegawai; Masih rendahnya Pagu Anggaran untuk membiaya tugas dan fungsi; masih perlunya sinergitas program/kegiatan antar bidang.

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-2021, bahwa capaian Pembangunan yang telah diraih pada Periode sebelumnya dan tantangan Pembangunan yang masih dihadapi, maka dalam kurun waktu periode 2016-2021 mendatang VISI Pembangunan Kabupaten Sukabumi adalah :

“Terwujudnya Kabupaten Sukabumi yang Religius dan Mandiri”.

Sejalan dengan VISI di atas, maka ada 4 (empat) MISI Utama yang akan dijalankan, yaitu :

- 1. Meningkatkan Kemandirian Ekonomi Masyarakat berbasis Potensi Lokal melalui Sektor Agribisnis, Pariwisata dan Industri Berwawasan Lingkungan.***
- 2. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berdaya saing tinggi dan religius.***
- 3. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang bersih dan Profesional.***
- 4. Optimalisasi Pelayanan Publik khususnya bidang Kesehatan, Pendidikan dan Infrastruktur.***

Adapun tupoksi DPMD untuk mendukung pelaksanaan Visi dan Misi tersebut yaitu melalui 3 Strategi Kebijakan dan 4 program yang diamanatkan oleh RPJMD 2016-2021 yaitu :

Strategi Kebijakan :

1. Peningkatan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.
2. Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal dan Lembaga Keuangan Mikro.
3. Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pembangunan.

Program :

1. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan
2. Program Peningkatan Partisipasi Pembangunan Kecamatan
3. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
4. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

3.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra DPMD Provinsi Jawa Barat

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya DPMD Kabupaten Sukabumi tidak terlepas dari pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Pusat melalui Kementerian Dalam Negeri RI dan Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Ditjen PMD), berdasarkan Renstra Kemendagri RI bahwa Ditjen PMD dan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Jawa Barat melaksanakan program :

1. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
2. Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
3. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat;
4. Fasilitasi Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat;
5. Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat;

6. Fasilitasi Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna;
7. Peningkatan Kemandirian Masyarakat Perdesaan (PNPM-MP); serta
8. Peningkatan Keberdayaan Masyarakat dan Desa lingkup Regional

Dalam rangka pelaksanaan program program tersebut DPMD Kabupaten Sukabumi senantiasa melaksanakan fasilitasi, koordinasi dan pengajuan program dan kegiatan berupa pelaksanaan program dan anggaran Urusan Bersama, Tugas Pembantuan dan Pelaksanaan Program dan Kegiatan yang berasal dari DIPA Ditjen PMD Kemendagri RI dan Kementerian Desa dan PDT.

Dalam Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Barat 2013-2018 diuraikan bahwa dinamika lingkungan strategis, baik nasional maupun global, permasalahan dan tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia semakin kompleks seperti yang dijelaskan pada tabel dibawah ini :

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan OPD Provinsi	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Jumlah penduduk miskin yang cenderung meningkat	Kurangnya sumber daya manusia yang berkompeten di bidang bidang tertentu.	DPMD Provinsi Jawa Barat merupakan OPD yang melaksanakan misi 5 bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, dengan peran pengembangan kapasitas pemerintahan desa bersama pemerintahan kabupaten/kota dalam rangka penguatan daya saing desa dan pembangunan perdesaan
2	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan	Meningkatnya jumlah pengangguran	Kurangnya data base perkembangan	DPMD Provinsi Jawa Barat merupakan OPD yang

	Masyarakat		desa sebagai bahan perencanaan.	melaksanakan urusan wajib pemberdayaan masyarakat dan desa, menerapkan pola pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa yang spesifik, holistik dan komprehensif, dalam rangka mewujudkan masyarakat berdaya, bersinergi dan mencapai hasil yang optimal.
3	Pemantapan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP)	Migrasi penduduk desa ke perkotaan	Belum optimalnya prasarana pendukung untuk melaksanakan seluruh pelaksanaan tupoksi secara computerise	Program pemberdayaan masyarakat dan desa secara kelembagaan ditangani dari pusat oleh Direktorat Perkotaan dan Perdesaan BAPPENAS, Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sampai daerah yakni Provinsi maupun kabupaten kota, yang bersinergi dan berorientasi secara berjenjang
4	Meningkatnya Pengembangan Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat	Kecenderungan menurunnya budaya gotong royong pada masyarakat desa dan perkotaan yang diindikasikan oleh rendahnya tingkat partisipasi dan keswadayaan masyarakat dalam pembangunan	Memudarnya rasa kebersamaan, kekeluargaan, dan persaudaraan sebagai bangsa Indonesia yang dicirikan dari : (a) menurunnya integrasi sosial masyarakat, (b) menurunnya semangat dan jiwa	Adanya dukungan sumber dana untuk menjalankan Visi, Misi dan Tupoksi DPMD

			gotong royong masyarakat dalam pembangunan desa dan kelurahan berdasarkan asas kebersamaan dan keanekaragaman, (c) menurunnya peran lembaga-lembaga kemasyarakatan dalam perencanaan, (d) menurunnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan.	
5	Meningkatnya Usaha Ekonomi Produktif Masyarakat Desa	Belum optimalnya kinerja pemerintahan Desa dan Kelurahan	Kesinambungan program yang masih fluktuatif setiap tahun.	Adanya komitmen bersama antara pimpinan dan staf untuk melaksanakan tupoksi dengan baik
6	Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan TTG	Lemahnya tingkat keberdayaan lembaga kemasyarakatan yang ada di Desa dan Kelurahan	Program kegiatan berlokasi desa belum bersinergi antar OPD di Jawa Barat.	
		Lemahnya pengelolaan Profil Desa dan Kelurahan sebagai bahan penyusunan perencanaan		
		Kapasitas masyarakat dan lembaga kemasyarakatan relatif masih rendah		
		Belum seluruhnya Sekretaris Desa menjadi PNS		

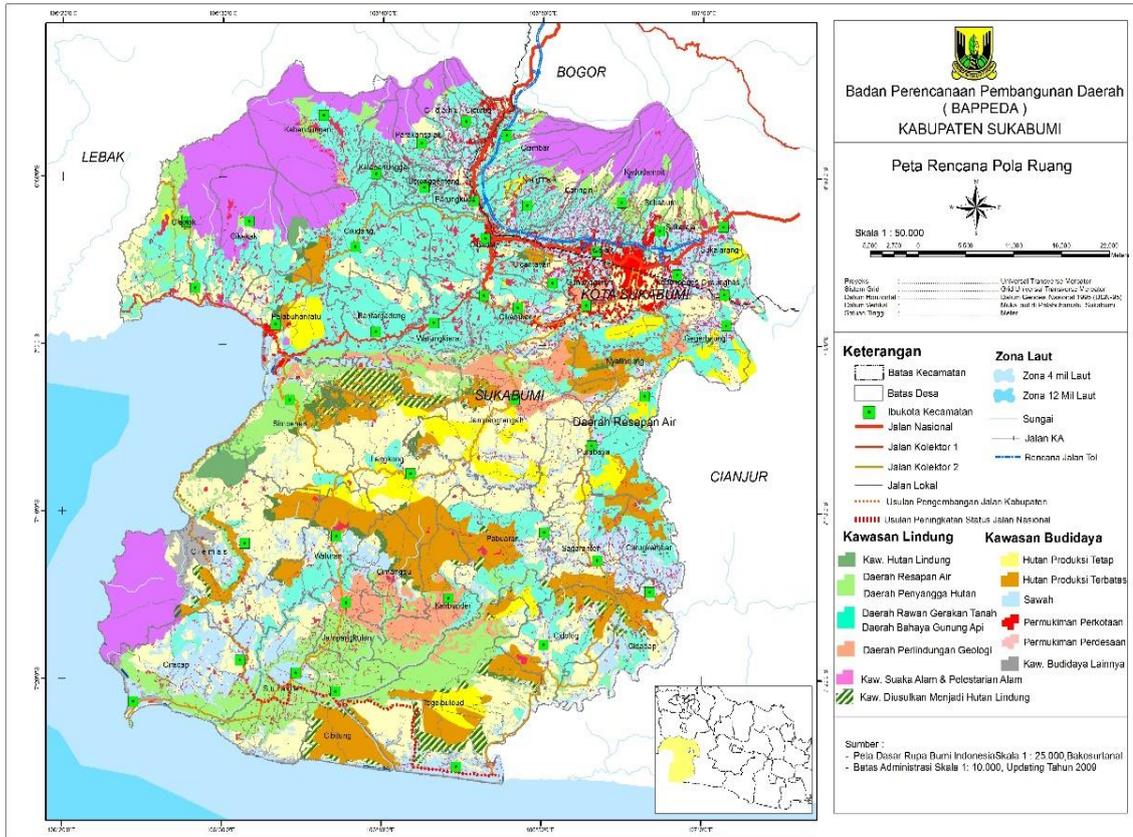
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkup Strategis.

Kabupaten Sukabumi berada di wilayah Provinsi Jawa Barat dengan jarak tempuh 95 km dari Ibukota Propinsi Jawa Barat (Bandung) dan 120 km dari Ibukota Negara (Jakarta). Secara geografis wilayah Kabupaten Sukabumi terletak diantara 6° 57' - 7° 25' Lintang Selatan dan 106°49' - 107°00' Bujur Timur dan mempunyai luas daerah 4.162 km² atau 11,21 persen dari luas Jawa Barat atau 3,01 persen dari luas Pulau Jawa, dengan batas-batas wilayahnya :

- Sebelah Utara, berbatasan dengan Kabupaten Bogor,
- Sebelah Selatan , berbatasan dengan Samudera Indonesia,
- Sebelah Barat, berbatasan dengan Kabupaten Lebak dan Samudera Indonesia, serta
- Sebelah Timur, berbatasan dengan Kabupaten Cianjur.

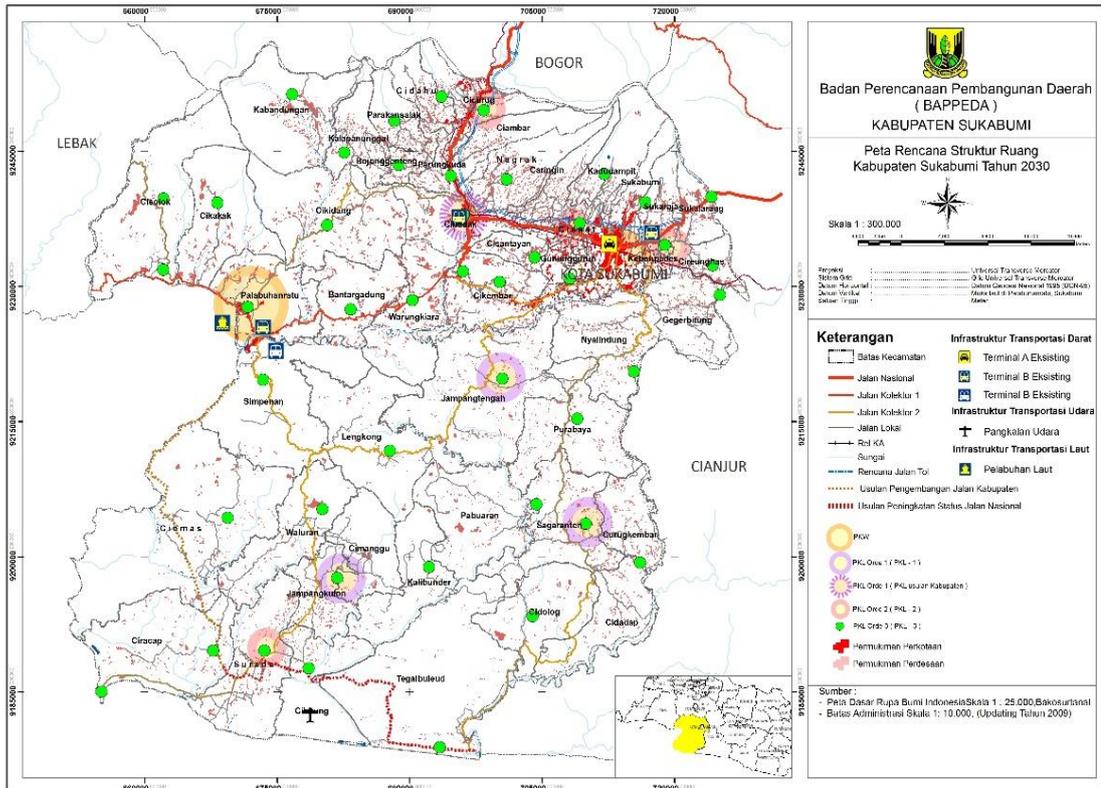
Selain itu secara administratif Kabupaten Sukabumi juga berbatasan secara langsung dengan wilayah Kota Sukabumi yang merupakan daerah kantong (*enclave*) dikelilingi beberapa wilayah kecamatan di Kabupaten Sukabumi, kecamatan tersebut yaitu Kecamatan Sukabumi di sebelah Utara, Kecamatan Cisaat dan Kecamatan Gunung Guruh di sebelah Barat, Kecamatan Nyalindung di sebelah Selatan, Kecamatan Sukaraja dan Kecamatan Kebonpedes di sebelah Timur.

Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukabumi tahun 2014-2034, rencana pemanfaatan kawasan lindung diarahkan berdasarkan klasifikasi kawasan lindung nasional, yang terdiri atas : 1) kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya; 2) kawasan perlindungan setempat; 3) kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya; 4) kawasan rawan bencana alam; 5) kawasan lindung geologi; dan 6) kawasan lindung lainnya. Rencana pola ruang Kabupaten Sukabumi dapat dilihat pada gambar 3.1 berikut :



Gambar 3.1
Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Sukabumi

Struktur Ruang Kabupaten Sukabumi membagi sistem pusat kegiatan kedalam Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), Pusat Kegiatan Lokal (PKL), Pusat Pelayanan Kawasan (PPK), serta Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) sebagaimana dapat terlihat dalam Gambar 3.2 dibawah ini.

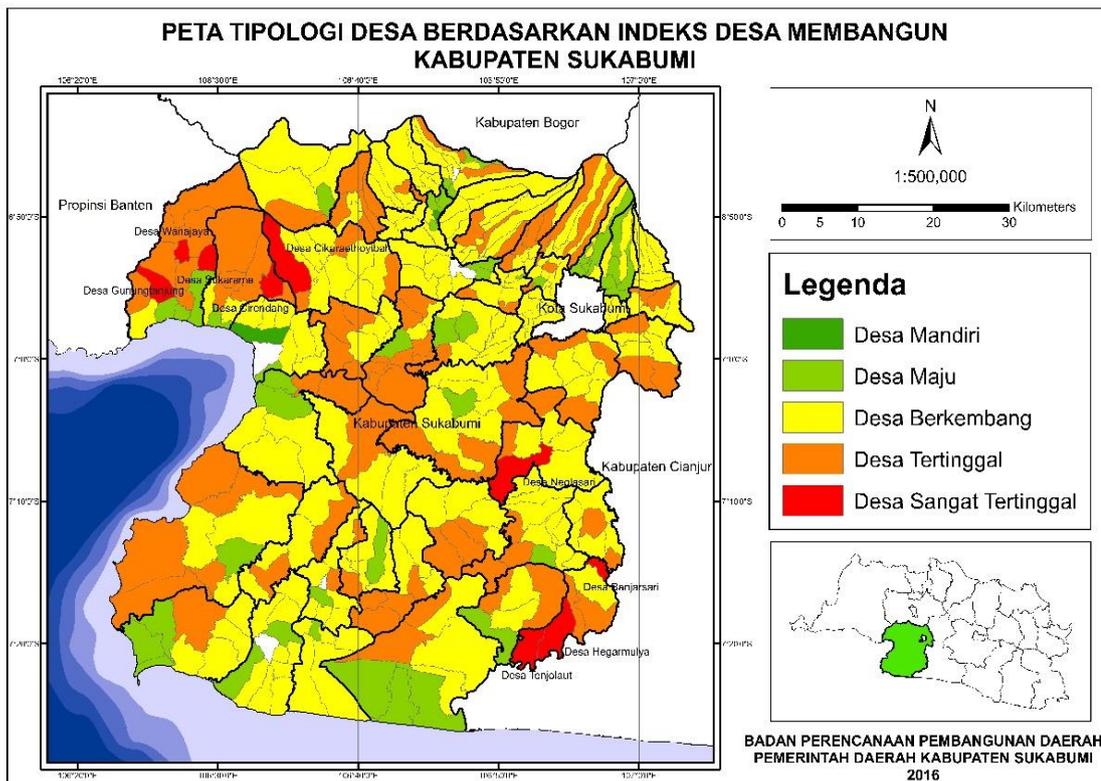


Gambar 3.2
Peta Rencana Struktur Ruang Kabupaten Sukabumi

Kabupaten Sukabumi merupakan salah satu kabupaten terluas di Pulau Jawa dan Bali yang secara administratif memiliki 47 kecamatan, 381 desa dan 5 Kelurahan. Luasnya wilayah Kabupaten Sukabumi tersebut memerlukan penanganan serius terutama yang berkaitan dengan pembangunan desa-desa yang masih masuk dalam kategori tertinggal dan sangat tertinggal, sebagaimana dalam penetapan tipologi status kemajuan desa berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM).

Seiring dengan perkembangannya di dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 pasal 9 serta Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016, tingkatan kemajuan desa didasarkan beberapa kriteria yaitu Desa tertinggal dan/atau sangat tertinggal, Desa berkembang, Desa maju dan/atau mandiri.

Saat ini di Kabupaten sukabumi terdapat 9 desa sangat tertinggal (2,4 %), 102 desa tertinggal (12,3%), 221 desa berkembang (58,0%), 47 desa maju (26, 8%) dan 2 desa mandiri (0,5 %). Hal ini dapat terlihat pada Gambar 3.3 berikut :



Gambar 3.3

Peta Tipologi Desa berdasarkan IDM Kabupaten Sukabumi

Pendekatan strategi dalam rangka mencapai tujuan percepatan Pembangunan Desa berbasis Indeks Desa Membangun dilaksanakan melalui :

1. peningkatan kualitas sumber daya manusia;
2. optimalisasi potensi wilayah desa sangat tertinggal dan desa tertinggal;
3. pengembangan Infrastruktur desa sangat tertinggal dan desa tertinggal;
4. peningkatan kemitraan dan kerjasama desa; dan
5. penguatan modal sosial dan lingkungan hidup.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Bahwa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam hal mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah tidak besentuhan langsung dengan kebijakan dan program yang sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2016-2021.

Perumusan isu-isu strategis didasarkan analisis terhadap lingkungan internal dan eksternal yaitu peluang dan ancaman serta memperhatikan kekuatan dan kelemahan pada DPMD Kabupaten Sukabumi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, maka isu-isu strategis yang menjadi acuan atau dasar dalam menentukan program dan kegiatan yang diprioritaskan selama lima tahun ke depan (2016-2021) untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan yaitu :

1. Masih adanya kategori Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang harus segera di tingkatkan.
2. Pelaksanaan tata kelola pemerintahan Desa yang memerlukan penyesuaian dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
3. Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pemerintah Desa yang masih rendah.
4. Peran dan fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa untuk menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan masih belum optimal.
5. Ketersediaan sarana dan prasarana fisik maupun non-fisik di desa dan kawasan perdesaan yang belum memadai.
6. Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Perekonomian Mikro Perdesaan masih belum optimal.

Adapun strategi berdasarkan analisis terhadap lingkungan internal dan eksternal adalah sebagai berikut :

Strategi S-O (Strengths – Opportunities) :

1. Mengoptimalkan kewenangan untuk mendorong masyarakat dalam bergotong royong dan berswadaya.

2. Mengoptimalkan SDM aparat, kelembagaan masyarakat dan masyarakat yang di dukung dengan anggaran pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan yang baik dan pembangunan yang partisipatif.
3. Memanfaatkan sistem administrasi dan manajemen pemerintahan desa yang sudah baku.
4. Memanfaatkan panduan dan sistem mekanisme kerja untuk mendukung program-program bantuan dari pusat dan propinsi.

Strategi W-O (Weakness – Opportunities) :

1. Membangun sistem informasi data yang akurat untuk mendukung program bantuan dari pusat dan propinsi.
2. Menambah sarana dan prasarana serta tenaga fungsional untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik dan pembangunan yang partisipatif.
3. Optimalisasi pemakaian anggaran dengan menggali potensi swadaya gotong royong masyarakat, partisipasi aparatur pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan.

Strategi S-T (Strengths – Treats) :

1. SDM aparat yang berkomitmen tinggi dan berpengalaman dalam tugas, panduan dan sistem mekanisme kerja serta anggaran yang tersedia untuk meningkatkan kualitas SDM, sarana dan prasarana desa, infrastruktur perdesaan serta mengurangi jumlah keluarga miskin.
2. Memanfaatkan sistem administrasi dan manajemen pemerintahan desa yang sudah baku untuk meningkatkan kinerja pemerintahan desa serta meningkatkan potensi desa.

Strategi W-T (Weakness – Treats) :

1. Optimalisasi pemakaian anggaran dengan membangun sistem informasi data yang akurat serta di dukung dengan sarana dan prasarana kerja yang memadai untuk mendukung program peningkatan sarana dan prasarana kantor desa, infrastruktur perdesaan serta pengurangan jumlah keluarga miskin.
2. Menambah tenaga fungsional untuk meningkatkan kualitas SDM aparat pemerintahan desa, kelembagaan masyarakat serta masyarakat desa.

BAB IV

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Rencana Strategis (Renstra) ini disusun secara sistematis dan berkelanjutan dari serangkaian kegiatan berupa Rencana Program dan kegiatan untuk kurun waktu 5 (lima) Tahun ke depan, yang akan dijadikan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja). Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ditetapkan dengan tujuan untuk memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi seluruh komponen Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan organisasi.

Penetapan tujuan dan sasaran merupakan tahap terpenting dalam perencanaan pembangunan dan akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja perangkat daerah. Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan suatu tingkatan prioritas tertinggi dalam rumusan kebijakan pada perencanaan strategis perangkat daerah.

Tujuan pembangunan adalah penjabaran atau implementasi dari pernyataan visi dan misi yang menunjukkan hasil akhir jangka waktu tertentu. Hal ini mengindikasikan bahwa tujuan adalah suatu pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab seluruh isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah. Pernyataan tujuan harus menunjukkan suatu kondisi optimal yang ingin dicapai dimasa datang dan juga diselaraskan dengan amanat pembangunan nasional.

Berdasarkan uraian sebagaimana telah dijelaskan di atas, maka arahan tujuan rencana strategis DPMD Kabupaten Sukabumi selama periode 2016-2021 dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Meningkatkan Profesionalisme Aparatur Pemerintahan Desa;
2. Meningkatkan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan;
3. Meningkatkan Kapasitas Lembaga dan Kemandirian Ekonomi Mikro Perdesaan;
4. Membangun budaya partisipasi masyarakat.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh lembaga dalam jangka waktu tertentu. Sasaran adalah salah satu dasar di dalam penilaian dan pemantauan kinerja sehingga merupakan alat pemicu bagi organisasi terhadap sesuatu yang harus dicapai, sejalan dengan hal tersebut sasaran jangka menengah DPMD Kabupaten Sukabumi yang telah dirumuskan dalam RPJMD adalah Peningkatan kapasitas kelembagaan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, Peningkatan kualitas dan profesionalisme pemerintahan desa dan Pemberian bantuan infrastruktur perdesaan.

Perumusan tujuan dan sasaran DPMD Kabupaten Sukabumi tahun 2016-2021 selanjutnya dijabarkan sebagai berikut :

Tujuan Kesatu : Meningkatkan Profesionalisme Aparatur Pemerintahan Desa

Upaya untuk mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Desa yang baik (*Good Village Governance*) memerlukan unsur profesionalisme dari aparatur pemerintahan desa dalam memberikan pelayanan publik. Profesionalisme disini lebih menekankan kepada kemampuan, keterampilan dan keahlian aparatur pemerintahan desa dalam memberikan pelayanan publik yang responsif, transparan, efektif dan efisien. Aparatur yang profesional pada prinsipnya mengandung 2 makna yakni : **Pertama**, profesi yaitu aparatur dituntut untuk memiliki ketrampilan dan keahlian yang dapat diandalkan sebagai penunjang kelancaran pelaksanaan tugas; **Kedua**, pengabdian yaitu sikap dan tindakan aparatur dalam menjalankan tugas administrasi desa harus senantiasa mendahulukan kepentingan umum dari pada kepentingan pribadi.

Aparatur Pemerintahan Desa sebagai bagian dari penunjang pembangunan Desa memerlukan efisiensi dan efektivitas dalam setiap pelaksanaan tugasnya apalagi sekarang sudah ada regulasi baru yaitu Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Aparatur Pemerintahan Desa memiliki beban tugas dan tanggung jawab mengelola keuangan desa yang cukup besar untuk penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Hal ini tentunya perlu ditunjang oleh kinerja aparatur pemerintahan desa yang professional. Guna meningkatkan kinerja aparat pemerintahan desa yang efektif dan efisien, maka sasaran pembangunan yang harus dicapai adalah :

1. Tersedianya Penyelenggara Pemerintah Desa yang profesional
2. Terwujudnya Pengelolaan Administrasi Desa yang baik

Tujuan Kedua : Meningkatkan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan.

Pemberdayaan masyarakat (*Community Empowerment*) sebagai sebuah paradigma pembangunan memiliki posisi unik jika dilihat dari perspektif urusan, karena sesungguhnya pemberdayaan masyarakat adalah 'ruh' dari pembangunan itu sendiri. Dalam tataran implementasi pemberdayaan masyarakat merupakan sebuah proses dan tujuan. Sebagai sebuah proses, ia taat pada azas Dari, Oleh dan Untuk Masyarakat sedangkan sebagai sebuah tujuan maka kemandirian masyarakat adalah tujuannya.

Guna meningkatkan keberdayaan masyarakat perdesaan, maka sasaran pembangunan yang harus dicapai adalah :

1. Menurunnya Status Desa Tertinggal dan Sangat Tertinggal.
2. Meningkatnya Keterampilan Tenaga Teknis dan Masyarakat.
3. Terwujudnya Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat.

Tujuan Ketiga : Meningkatkan Kapasitas Lembaga dan Kemandirian Ekonomi Mikro Perdesaan

Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 menyebutkan bahwa pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan, dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.

Peningkatan Kapasitas Lembaga dan Kemandirian Ekonomi Mikro Perdesaan merupakan salah satu upaya mendasar dalam perwujudan kesejahteraan masyarakat perdesaan. Potensi sumberdaya di desa yang melimpah dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk eksistensi kelembagaan ekonomi mikro perdesaan.

Peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa harus dibangun berdasarkan beberapa pilar utama sekaligus, yaitu: (1) kekuatan kelembagaan dan modal usaha produksi kolektif masyarakat, (2) keterlibatan bermakna masyarakat dalam tata pemerintahan Desa, (3) penguasaan atas literasi keuangan usaha dan (4) pengembangan serta pengelolaan BUM Desa yang tepat dan handal. Guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan ekonomi mikro perdesaan, maka sasaran pembangunan yang harus dicapai adalah :

1. Terwujudnya Manajemen Pengelolaan BUMDesa
2. Terwujudnya Pemberdayaan Lembaga Usaha Ekonomi Desa

Tujuan Keempat : Membangun budaya partisipasi masyarakat

Untuk mewujudkan keberhasilan pembangunan desa, inisiatif dan kreatifitas dari anggota masyarakat yang lahir dari kesadaran dan tanggung jawab sebagai penduduk desa diharapkan tumbuh berkembang sebagai suatu partisipasi. Partisipasi merupakan keterlibatan masyarakat

secara aktif masyarakat dapat juga keterlibatan dalam proses penentuan arah, strategi kebijaksanaan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah. Menurunnya tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan merupakan fenomena permasalahan yang harus segera diselesaikan guna mendukung pelaksanaan pembangunan di desa. Adapun sasaran yang harus dicapai dalam adalah terwujudnya budaya partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Tujuan dan sasaran Jangka Menengah pelayanan DPMD lebih lengkapnya sebagaimana yang tercantum dalam **Tabel 4.1** dibawah ini :

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukabumi 2016-2021

No	Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Target	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Sasaran Tahun					
						2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Meningkatkan Profesionalisme Aparatur Pemerintahan Desa	Meningkatnya Kompetensi Penyelenggara Pemerintah Desa	54,68 %	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan Penyelenggara Pemerintah Desa yang profesional - Meningkatkan Pengelolaan Administrasi Desa yang baik 	- Persentase Penyelenggara Pemerintah Desa yang terlatih/mendapatkan sertifikat kelulusan	39,37	52,49	52,49	65,62	65,62	52,49
					- Persentase administrasi desa yang terkelola dengan baik	1,57	1,57	1,57	1,57	1,57	1,57
2	Meningkatkan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Meningkatnya Lembaga Kemasyarakatan desa yang berkembang	7,87%	<ul style="list-style-type: none"> - Status Desa Tertinggal dan Sangat Tertinggal. - Meningkatkan Keterampilan Tenaga Teknis dan Masyarakat. - Meningkatkan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat. 	- Persentase Desa Tertinggal & Sangat Tertinggal yang statusnya meningkat	2	2	2	2	2	1,81
					- Persentase Tenaga Teknis dan Masyarakat yang terlatih/mendapatkan sertifikat	26,24	26,24	26,24	26,24	26,24	26,24
					- Persentase Kelompok Binaan Lembaga Kemasyarakatan Desa	1,31	1,31	1,31	1,31	1,31	1,31

No	Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Target	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Sasaran Tahun					
						2016	2017	2018	2019	2020	2021
3	Meningkatkan Kapasitas Lembaga dan Kemandirian Ekonomi Mikro Perdesaan	Meningkatnya Ekonomi Mikro pedesaan yang mandiri	3,15%	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya Manajemen Pengelolaan BUMDesa - Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Usaha Ekonomi Desa 	- Persentase BUMDesa yang berkembang	1,31	2,62	2,62	2,62	2,62	2,62
					- Persentase Lembaga Usaha Ekonomi Desa yang mandiri	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	1,81
4	Membangun Budaya Partisipasi Masyarakat	Meningkatnya Partisipasi masyarakat dalam pembangunan	52,49 %	- Meningkatnya budaya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	- Persentase Kelompok Masyarakat yang berpartisipasi dalam Pembangunan	52,49	52,49	52,49	52,49	52,49	52,49

4.2 Strategi dan Kebijakan

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan yang komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra DPMD Kabupaten Sukabumi dengan efektif dan efisien. Strategi dan arah kebijakan merupakan salah satu sarana untuk melakukan perubahan, transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja daerah. Perencanaan yang komprehensif disusun dengan mengagendakan aktivitas pembangunan dengan segala program yang mendukung capaian pembangunan. Salah satu poin penting dalam aktivitas tersebut adalah upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, serta pemanfaatan teknologi informasi sehingga pembangunan daerah mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat dan merata ke seluruh aspek kehidupan masyarakat dapat terwujud.

Rumusan strategi menunjukkan langkah dan keinginan yang kuat dari pemerintah daerah dalam menciptakan nilai tambah (*value added*) perencanaan bagi para pemangku kepentingan pembangunan daerah. Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan tujuan dalam sasaran. Rumusan strategi dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai dan diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.

Beberapa langkah yang telah ditempuh untuk menentukan strategi pembangunan jangka menengah Kabupaten Sukabumi antara lain:

1. Mengkaji sasaran pembangunan lima tahunan;
2. Mengkaji gambaran umum kondisi daerah dan capaian pembangunan sampai dengan periode awal perencanaan serta permasalahan pembangunan terpenting dan isu-isu strategis pembangunan daerah;
3. Melakukan analisis lingkungan internal dan eksternal untuk mengukur kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman yang akan dihadapi oleh daerah (khususnya pemerintahan daerah);

4. Merumuskan faktor-faktor ukuran keberhasilan (*key success factors*) dan pengembangan berbagai kerangka kebijakan (arah kebijakan dan kebijakan umum) dari strategi-strategi yang dirancang berdasarkan analisis sebelumnya;
5. Mengevaluasi berbagai alternatif strategi dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki dan kondisi eksternal yang dihadapi; dan
6. Memilih strategi yang paling sesuai untuk mencapai sasaran pembangunan jangka menengah dengan memerhatikan arah kebijakan yang efektif untuk mencapai sasaran Renstra.

Rumusan pernyataan strategi dan kebijakan DPMD Kabupaten Sukabumi dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan untuk lima tahun mendatang maka diperlukan komitmen bersama dalam bentuk strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan, adapun rumusan strategi dan kebijakan tersebut sebagaimana diuraikan dalam Tabel 4.2 dibawah ini.

Tabel 4.2
Strategi dan Kebijakan
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Sukabumi

Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan Profesionalisme Aparatur Pemerintahan Desa	Meningkatnya Kompetensi Penyelenggara Pemerintah Desa	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan Penyelenggara Pemerintah Desa yang profesional - Meningkatkan Pengelolaan Administrasi Desa yang baik 	Peningkatan Kinerja Pemerintah dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan Kapasitas Penyelenggara Pemerintahan Desa 2. Meningkatkan Manajemen Pengelolaan Administrasi Desa 3. Mengembangkan Teknologi Informasi Desa 4. Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat 5. Meningkatkan Penggalan dan Pengelolaan Pendapatan Asli Desa 6. Memfasilitasi Pemekaran Desa 7. Memfasilitasi Pemilihan Kepala Desa 8. Meningkatkan pembinaan, Monitoring dan Evaluasi

				terhadap kinerja Pemerintahan Desa.
Meningkatkan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Meningkatnya Lembaga Kemasyarakatan desa yang berkembang	<ul style="list-style-type: none"> - Status Desa Tertinggal dan Sangat Tertinggal. - Meningkatnya Keterampilan Tenaga Teknis dan Masyarakat. - Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat. 	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pembangunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memfasilitasi Bantuan Infrastruktur dan Suprastruktur Perdesaan. 2. Melaksanakan Updating Data Profil Desa secara rutin. 3. Melaksanakan Evaluasi Tingkat Perkembangan Desa. 4. Memfasilitasi Pengadaan Sarana Prasarana Perdesaan. 5. Meningkatkan Akses Transportasi, Pendidikan, Kesehatan dan daya beli masyarakat. 6. Menurunkan Persentase Desa tertinggal. 7. Meningkatkan pembinaan, Monitoring dan Evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan pembangunan.
Meningkatkan Kapasitas Lembaga dan Kemandirian Ekonomi Mikro Pedesaan	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya Ekonomi Mikro pedesaan yang mandiri 	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya Manajemen Pengelolaan BUMDesa - meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Usaha Ekonomi Desa 	Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal dan Lembaga Keuangan Mikro	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan peran serta masyarakat pedesaan dalam mengisi pembangunan desa melalui pemberdayaan ekonomi kerakyatan. 2. Mengupayakan optimalisasi pemanfaatan lembaga ekonomi masyarakat desa. 3. Memfasilitasi BUMDesa Bersama. 4. Memfasilitasi terjalannya Kerasama Antar Desa. 5. Memfasilitasi tersusunnya regulasi yang menguatkan keberadaan dan eksistensi lembaga ekonomi di tingkat desa. 6. Memfasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna. 7. Meningkatkan pembinaan, Monitoring dan Evaluasi terhadap lembaga ekonomi masyarakat desa

<p>Membangun Budaya Partisipasi Masyarakat</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya Partisipasi masyarakat dalam pembangunan 	<ul style="list-style-type: none"> - Terwujudnya budaya partisipasi masyarakat dalam pembangunan 	<p>Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pembangunan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan peran serta masyarakat perdesaan dalam mengisi pembangunan desa melalui upaya partisipasi dan komitmen bersama. 2. Mengupayakan optimalisasi pemanfaatan lembaga kemasyarakatan dan lembaga pemerintahan di tingkat desa dalam upaya efektifitas pelaksanaan pembangunan. 3. Memfasilitasi segala bentuk upaya pemerintahan desa terhadap terselenggaranya gerakan gotong royong dalam membangun desa. 4. Melaksanakan Program Terpadu Pemberdayaan Masyarakat. 5. Meningkatkan pembinaan, Monitoring dan Evaluasi terhadap lembaga kemasyarakatan.
--	---	---	---	---

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Bab ini menyajikan isi Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif yang akan dilaksanakan sepanjang periode waktu 2016-2021, Daftar rencana indikasi rencana program dan kegiatan ini disusun dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sesuai dengan batas kewenangan Bupati Sukabumi, sebagaimana dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007, sehingga tidak akan berbenturan dan mengalami duplikasi dengan program yang masuk dalam yurisdiksi kewenangan Provinsi dan Pusat;
2. Sesuai dengan batas tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), sehingga tidak akan berbenturan dengan program turunan tugas pokok dan fungsi Kepala Dinas dan atau SKPD lain di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukabumi;
3. Disusun berdasarkan statistik kondisi masa kini, target kinerja yang terukur, lokasi dan kelompok sasaran kegiatan serta rumusan kebijakan teknis yang mudah disinkronkan dengan daftar nomenklatur program dan kode rekening kegiatan sebagaimana diuraikan di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007.

Indikasi rencana program prioritas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berisi program-program prioritas untuk mencapai visi dan misi Bupati serta penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Program prioritas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan bentuk instrumen kebijakan yang terdiri dari satu atau lebih kegiatan untuk melaksanakan kebijakan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa. Kegiatan ini mendapat prioritas dalam pendanaan untuk

melaksanakan kegiatan sesuai Rencana Strategis DPMD Kabupaten Sukabumi sehingga pencapaian sasaran dan tujuan pemberdayaan masyarakat dan desa dapat terwujud. Keseluruhan rangkaian perencanaan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa bermuara pada penentuan program prioritas yang selanjutnya diterjemahkan oleh tiap-tiap bidang ke dalam kegiatan prioritas. Perencanaan program prioritas dalam dokumen RENSTRA harus dirumuskan dengan seksama mengingat pentingnya esensi program prioritas bagi rujukan utama pelaksanaan perencanaan kegiatan tiap tahun yang dituangkan ke dalam Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah.

Pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program tahunan dimana program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pagu indikatifnya kemudian dijadikan sebagai acuan DPMD Kabupaten Sukabumi, termasuk penjabaran kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya. Pagu indikatif merupakan rancangan maksimal atas rencana belanja atau anggaran yang akan dituangkan dalam APBD. Pagu indikatif dialokasikan ke setiap program prioritas masing-masing urusan untuk mencapai target setiap indikator yang telah ditetapkan selama 5 (lima) tahun ke depan.

Mengacu pada hubungan klasifikasi belanja menurut urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, maka program pembangunan yang menjadi prioritas DPMD Kabupaten Sukabumi dalam 5 (lima) tahun disusun berdasarkan program prioritas dan beserta pagu indikatif pelaksanaannya. Rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan RENSTRA DPMD Kabupaten Sukabumi tahun 2016-2021 selengkapnya dapat dilihat pada **Tabel 5.1** berikut ini.

Tabel 5.1
Daftar Rencana Program Prioritas dan Kebutuhan Pendanaan
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukabumi 2016-2021

No	Program	Indikator Kinerja	Penjelasan	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Target Kinerja														SKPD Penanggung jawab
						Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA																				
DPMD																				
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran		%	100%	100%	771	100%	848	100%	933	100%	1,026	100%	1,129	100%	1,242	100%	5,950	DPMD
2	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		%	0%	20%	250	20%	250	20%	270	20%	270	20%	300	20%	300	100%	1,640	DPMD
3	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur		%	100%	100%	650	100%	1,000	100%	1,050	100%	1,150	100%	1,200	100%	1,300	100%	6,350	DPMD
4	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Disiplin Aparatur		%	100%	100%	69,5	100%	69,5	100%	69,5	100%	69,5	100%	69,5	100%	69,5	100%	417	DPMD

No	Program	Indikator Kinerja	Penjelasan	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Target Kinerja														SKPD Penanggung jawab
						Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan		%	100%	100%	113	100%	124	100%	137	100%	150	100%	165	100%	182	100%	871	DPMD
5	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	Persentase BUMDesa yang berkembang		%	100%	1,31%	750	2,62%	750	2,62%	900	2,62%	1,000	2,62%	1,200	2,62%	1,300	14,44%	5,900	DPMD
		Persentase Lembaga Usaha Ekonomi Desa yang mandiri		%		0,52%	650	0,52%	1,950	0,52%	1,450	0,52%	1,450	0,52%	1,650	0,52%	1,700	3,15%	8,850	DPMD
6	Program Peningkatan Partisipasi Pembangunan Kecamatan	Persentase kelompok masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan		%	52,49%	52,49%	2500	52,49%	2500	52,49%	2900	52,49%	3000	52,49%	3300	52,49%	3400	52,49%	17600	KECAMATAN/ DPMD
7	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Persentase Penyelenggara Pemerintah Desa yang terlatih		%	200%	39,37%	2,600	52,49%	5,200	52,49%	1,350	65,62%	7,500	65,62%	1,650	52,49%	4,300	54,68%	22,600	DPMD

No	Program	Indikator Kinerja	Penjelasan	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Target Kinerja														SKPD Penanggung jawab
						Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		Persentase Administrasi Desa yang dikelola dengan baik		%	6,56%	1,31%	850	1,31%	1,750	1,31%	2,150	1,31%	1,900	1,31%	3,100	1,31%	2,600	7,87%	12,350	DPMD
8	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Persentase Tenaga Teknis dan Masyarakat yang terlatih		%		26,25%	300	26,25%	1,000	26,25%	1,000	26,25%	1,200	26,25%	1,200	26,25%	1,400	26,25%	6,100	DPMD
		Status Desa Tertinggal dan Sangat Tertinggal		Desa	111	2	1,800	2	2,200	2	2,400	2	2,700	2	2,800	2	3,200	12	15,100	DPMD
		Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Kemasyarakatan Desa		%	3,67%	1,31%	400	1,31%	1,150	1,31%	1,300	1,31%	1,450	1,31%	1,600	1,31%	1,700	7,87%	7,600	DPMD

Dalam rangka memudahkan untuk pencapaian kinerja dari setiap indikasi rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan yang disajikan di atas, maka DPMD Kabupaten Sukabumi menurunkan kedalam berbagai kegiatan pendukung program prioritas pemberdayaan masyarakat dan desa dengan target kinerja setiap tahun sebagai Rencana Kerja Tahunan DPMD Kabupaten Sukabumi. Hal tersebut dapat dilihat pada **Tabel 5.2**.

Tabel 5.2
Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukabumi

Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja PD Penanggungjawab	Lokasi	
								Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi kinerja akhir Renstra PD				
								target	Rp. (000)	target	Rp. (000)	target	Rp. (000)	target	Rp. (000)	target	Rp. (000)	target	Rp. (000)	target	Rp. (000)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
Meningkatnya Kinerja DPMD Kab. Sukabumi	Efisiensi dan Efektivitas Birokrasi	Meningkatnya Efisiensi dan Efektivitas Birokrasi	Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional SKPD		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Proporsitas Pelayanan Administrasi Perkantoran	90%	100%	771,000	100%	848,000	100%	933,000	100%	1,026,000	100%	1,129,000	100%	1,242,000	100%	5,949,000	DPMD		
					Pelayanan Administrasi Perkantoran	Proporsitas Pelayanan Administrasi Perkantoran	90%	100%	771,000	100%	848,000	100%	933,000	100%	1,026,000	100%	1,129,000	100%	1,242,000	100%	5,949,000	DPMD		
Meningkatnya Kinerja DPMD Kab. Sukabumi	Efisiensi dan Efektivitas Birokrasi	Meningkatnya Efisiensi dan Efektivitas Birokrasi	Tingkat Pemenuhan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Proporsitas Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	100%	250,000	100%	250,000	100%	270,000	100%	270,000	100%	300,000	100%	300,000	100%	1,640,000	DPMD		
					Pengembangan Kapasitas Pegawai	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur	33 orang	33 orang	250,000	33 orang	250,000	35 orang	270,000	35 orang	270,000	37 orang	300,000	37 orang	300,000	37 orang	1,640,000	DPMD		
Meningkatnya Kinerja DPMD Kab. Sukabumi	Efisiensi dan Efektivitas Birokrasi	Meningkatnya Efisiensi dan Efektivitas Birokrasi	Tingkat Pemenuhan Kebutuhan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Kerja		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Proporsitas tersedianya sarana prasarana aparatur	100%	100%	705,000	100%	1,060,000	100%	1,110,000	100%	1,210,000	100%	1,260,000	100%	1,360,000	100%	6,705,000	DPMD		
					Pengadaan Meubeler	Jumlah Meubeler Kantor	1 pkt	1 pkt	100,000	1 pkt	200,000	5 pkt	1,100,000	DPMD										
					Pengadaan Peralatan dan Perengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perengkapan Kantor	1 pkt	1 pkt	150,000	1 pkt	200,000	5 pkt	1,150,000	DPMD										
					Pengadaan Perangkat komputer	Jumlah Perangkat komputer	4 Unit	55,000	1 pkt	60,000	5 pkt	355,000	DPMD											
					Pemeliharaan Rutin/Berkala AC	Jumlah AC yang terpelihara	26 unit	26 unit	50,000	26 unit	100,000	26 unit	100,000	26 unit	150,000	26 unit	150,000	26 unit	200,000	26 unit	750,000	DPMD		
					Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas yang terpelihara	8 unit	8 unit	350,000	8 unit	400,000	8 unit	450,000	8 unit	450,000	9 unit	500,000	9 unit	550,000	9 unit	2,700,000	DPMD		
					Rehabilitasi/Pemeliharaan Gedung Kantor	Jumlah Gedung yang direhab/dipelihara	1 gedung	-	100,000	1 gedung	100,000	1 gedung	150,000	1 gedung	650,000	DPMD								
Meningkatnya Kinerja DPMD Kab. Sukabumi	Efisiensi dan Efektivitas Birokrasi	Meningkatnya Efisiensi dan Efektivitas Birokrasi	Tingkat Disiplin Aparatur		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Proporsitas Sumber Daya Aparatur yang disiplin	100%	100%	69,500	100%	69,500	100%	69,500	100%	69,500	100%	69,500	100%	69,500	100%	417,000	DPMD		
					Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas yang tersedia	45 pkt	45 pkt	20,000	45 pkt	20,000	45 pkt	20,000	45 pkt	20,000	45 pkt	20,000	45 pkt	20,000	45 pkt	120,000	DPMD		
					Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah Pakaian Khusus Hari-Hari tertentu yang tersedia	45 pkt	45 pkt	49,500	45 pkt	49,500	45 pkt	49,500	45 pkt	49,500	45 pkt	49,500	45 pkt	49,500	45 pkt	297,000	DPMD		

Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja PD Penanggungjawab	Lokasi
								Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi kinerja akhir Renstra PD			
								target	Rp. (000)	target	Rp. (000)	target	Rp. (000)	target	Rp. (000)	target	Rp. (000)	target	Rp. (000)	target	Rp. (000)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	22	23
Meningkatnya Kinerja DPMD Kab. Sukabumi	Efisiensi dan Efektivitas Birokrasi	Meningkatnya Efisiensi dan Efektivitas Birokrasi	Cakupan Pelaporan Capaian Kinerja		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Prosentase Dokumen Pelaporan Capaian Kinerja	100%	100%	113,000	100%	124,000	2 dok	237,000	100%	250,000	100%	265,000	100%	282,000	100%	1,271,000	DPMD	
					Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	1 dok	1 dok	98,000	1 dok	109,000	1 dok	122,000	1 dok	135,000	1 dok	150,000	1 dok	167,000	1 dok	781,000	DPMD	
					Fasilitasi Kebijakan	Jumlah Dokumen Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi						3 dok	100,000	3 dok	100,000	3 dok	100,000	4 dok	100,000	3 dok	100,000	DPMD	
					Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan	1 dok	1 dok	15,000	1 dok	15,000	1 dok	15,000	1 dok	15,000	1 dok	15,000	1 dok	15,000	1 dok	90,000	DPMD	
Meningkatkan Profesionalisme Aparatur Pemerintah Desa	Kompetensi penyelenggara pemerintah Desa	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintah Desa yang profesional	Penyelenggara Pemerintah Desa yang terlatih		Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	Persentase Penyelenggara Pemerintah Desa yang terlatih	200	39.37	3,050,000	52.49	4,000,000	52.49	3,800,000	65.62	4,800,000	65.62	4,200,000	52.49	4,650,000	54.68	24,500,000	DPMD	
		Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Desa yang baik	Pengelolaan Administrasi Desa yang tertib dan teratur			Persentase Administrasi Desa yang dikelola dengan baik	6.56	1.31	1,050,000	1.31	3,400,000	1.31	3,850,000	1.31	3,650,000	1.31	5,250,000	1.31	4,800,000	7.87	22,000,000	DPMD	
					Bimbingan Teknis aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan desa	Jumlah aparatur Pmdes yg di Bimtek Pengelolaan Keuangan Desa	381 orang	100 orang	200,000	200 orang	400,000	200 orang	450,000	200 orang	500,000	200 orang	550,000	200 orang	600,000	1.100 orang	2,700,000	DPMD	
					Bimbingan Teknis aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa	Jumlah aparatur Pmdes yg di Bimtek manajemen Pmdes	-	100 orang	200,000	200 orang	400,000	200 orang	450,000	200 orang	500,000	200 orang	550,000	200 orang	600,000	1.100 orang	2,700,000	DPMD	
					Bimbingan Teknis Administrasi Desa	Jumlah aparatur Pmdes yg di Bimtek Administrasi Desa	-	100 orang	200,000	200 orang	400,000	200 orang	450,000	200 orang	500,000	200 orang	550,000	200 orang	600,000	1.100 orang	2,700,000	DPMD	
					Bimbingan Teknis Kepala Desa Pemula dan Ladies Program	Jumlah Kepala Desa dan Istri Kepala Desa yang di Bimtek	-	140 orang	250,000	200 orang	400,000	-	422 orang	800,000	-	140 orang	250,000	762 orang	1,700,000	DPMD			
					Bimbingan Teknis BPD	Jumlah Anggota BPD yang di Bimtek	-	100 orang	200,000	200 orang	400,000	200 orang	450,000	200 orang	500,000	200 orang	550,000	200 orang	600,000	1.100 orang	2,700,000	DPMD	
					Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah aparatur Pmdes yg di bina dalam penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	381 orang	100 orang	200,000	200 orang	400,000	200 orang	450,000	200 orang	500,000	200 orang	550,000	200 orang	600,000	1.100 orang	2,700,000	DPMD	
					Profil Desa	Jumlah data Profil Desa yang up to date	381 Desa	47 Desa	300,000	381 Desa	500,000	381 Desa	600,000	381 Desa	700,000	381 Desa	800,000	381 Desa	900,000	381 Desa	3,800,000	DPMD	
					Pengawasan Batas Desa	Jumlah Batas Desa yang Teridentifikasi	10 Desa	-	5 Desa	250,000	25 Desa	1,250,000	DPMD										
					Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang Undangan	Jumlah Rancangan Peraturan Bupati yang tersusun	5 perbup	1 perbup	50,000	1 perbup	50,000	1 perbup	50,000	1 perbup	100,000	1 perbup	100,000	1 perbup	100,000	6 perbup	450,000	DPMD	
					Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Desa	Jumlah desa yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan desa	381 Desa	381 Desa	200,000	381 Desa	250,000	381 Desa	300,000	381 Desa	350,000	381 Desa	400,000	381 Desa	450,000	381 Desa	1,950,000	DPMD	
					Pengadaan Sarana Prasarana Entri Data Profil Desa/Kel	Jumlah desa yang menyediakan Sarana Prasarana Entri Data Profil Desa/Kel	30 desa	5 desa	50,000	5 desa	50,000	5 desa	70,000	5 desa	80,000	5 desa	90,000	5 desa	100,000	30 desa	450,000	DPMD	

Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja PD Penanggungjawab	Lokasi	
								Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi kinerja akhir Renstra PD				
								target	Rp. (000)	target	Rp. (000)	target	Rp. (000)	target	Rp. (000)	target	Rp. (000)	target	Rp. (000)	target	Rp. (000)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	22	23	
					Pembinaan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Desa yang tertib dalam penyusunan dokumen Perencanaan Pembangunan Desa	-	-	70 Desa	300,000	100 Desa	500,000	-	-	211 Desa	1,000,000	70 Desa	300,000	381 Desa	2,100,000	DPMD			
					Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak	Jumlah Desa yang menyelenggarakan Pemilihan Kepala Desa Serentak hemelomban	381 Desa	70 Desa	6,000,000	100 Desa	10,000,000	-	-	211 Desa	20,000,000	-	-	70 Desa	8,000,000	381 Desa	44,000,000	DPMD		
					Lomba Desa	Jumlah Desa yang mengikuti Perlombaan Desa	25 Desa	5 Desa	300,000	10 Desa	400,000	10 Desa	450,000	10 Desa	500,000	10 Desa	550,000	10 Desa	600,000	60 Desa	2,800,000	DPMD		
					Pembinaan Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APB Desa)	Jumlah Desa yang tertib dalam penyusunan APB Desa	381 Desa	-	75 Desa	150,000	75 Desa	150,000	75 Desa	150,000	78 Desa	250,000	78 Desa	250,000	381 Desa	950,000	DPMD			
					Pendataan Asset Desa	Tersedianya Data Asset Desa	381 Desa	-	75 Desa	200,000	75 Desa	200,000	75 Desa	200,000	78 Desa	250,000	78 Desa	250,000	381 Desa	1,100,000	DPMD			
					Dukungan Penatausahaan Keuangan dan Asset Desa	Jumlah Desa yang tertib dalam penatausahaan Keuangan dan Asset Desa	381 Desa	-	75 Desa	200,000	75 Desa	200,000	75 Desa	200,000	78 Desa	250,000	78 Desa	250,000	381 Desa	1,100,000	DPMD			
					Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa	Jumlah Dokumen hasil Monitoring dan Evaluasi APB Desa	381 Desa	-	75 Desa	150,000	75 Desa	150,000	75 Desa	150,000	78 Desa	250,000	78 Desa	250,000	381 Desa	950,000	DPMD			
					Dukungan Manajemen Bala Sawa Siskeudes	Jumlah Desa yang mengelola Siskeudes	381 Desa	-	381 Desa	350,000	381 Desa	350,000	381 Desa	350,000	381 Desa	350,000	381 Desa	350,000	381 Desa	1,750,000	DPMD			
					Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengelolaan keuangan dan aset desa	Jumlah perangkat desa yang dilatih	47 kec		47 kec	30,000	47 kec	100,000	47 kec	100,000	47 kec	100,000	47 kec	120,000	47 kec	120,000	47 kec	530,000	DPMD	
					Bimbingan teknis penatausahaan keuangan dan aset desa	Jumlah perangkat desa yang dilatih			70 orang	100,000	71 orang	110,000	80 orang	120,000	80 orang	120,000	80 orang	130,000	381 orang	580,000	DPMD			
					Bimbingan teknis perencanaan keuangan dan aset desa	Jumlah perangkat desa yang dilatih			100 orang	160,000	100 orang	160,000	100 orang	175,000	100 orang	175,000	100 orang	180,000	500 orang	850,000	DPMD			
					Pembinaan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa	Jumlah Desa yang tertib dalam pertanggungjawaban Keuangan dan Asset Desa	381 Desa	-	75 Desa	200,000	75 Desa	200,000	75 Desa	200,000	78 Desa	250,000	78 Desa	250,000	381 Desa	1,100,000	DPMD			
Meningkatkan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Lembaga kemasyarakatan desa	meningkatnya status desa	Tingkat Status Desa Tertinggal dan Sangat Tertinggal		Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Jumlah Desa Sangat Tertinggal dan Tertinggal yang statusnya meningkat	111 desa	2 desa	1,800,000	2 desa	2,700,000	2 desa	2,900,000	2 desa	3,200,000	2 desa	3,300,000	2 desa	3,700,000	12 desa	17,600,000	DPMD		
		meningkatnya Keterampilan Tenaga Teknis dan Masyarakat	Tingkat Keterampilan Tenaga Teknis dan Masyarakat			Persentase Tenaga Teknis dan Masyarakat yang terlatih	26.25	300,000	26.25	1,000,000	26.25	1,000,000	26.25	1,200,000	26.25	1,200,000	26.25	1,400,000	26.25	6,100,000	DPMD			
		meningkatnya Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat	Cakupan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat			Persentase Kelompok Binaan Lembaga Kemasyarakatan Desa	3.67	1.31	400,000	1.31	1,150,000	1.31	1,300,000	1.31	1,450,000	1.31	1,600,000	1.31	1,700,000	7.87	7,600,000	DPMD		
					Pemberdayaan Desa-Desa Tertinggal	Jumlah Desa Sangat Tertinggal dan Tertinggal yang statusnya meningkat	111 Desa	2 Desa	1,000,000	2 Desa	1,200,000	2 Desa	1,400,000	2 Desa	1,600,000	2 Desa	1,700,000	2 Desa	2,000,000	12 Desa	8,900,000	DPMD		

Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja PD Penanggungjawab	Lokasi
								Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi kinerja akhir Renstra PD			
								target	Rp. (000)	target	Rp. (000)	target	Rp. (000)	target	Rp. (000)	target	Rp. (000)	target	Rp. (000)	target	Rp. (000)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	22	23
					Penyelenggaraan Bimbingan Teknis Tenaga Teknis dan Masyarakat	Jumlah Tenaga Teknis dan Masyarakat yang terlatih	-	-	100 orang	200,000	100 orang	200,000	100 orang	250,000	100 orang	250,000	100 orang	300,000	500 orang	1,200,000	DPMD		
					Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi Masyarakat Desa	Jumlah Masyarakat yang ikut Diseminasi Informasi tentang Desa	-	-	200 orang	400,000	200 orang	400,000	200 orang	450,000	200 orang	450,000	200 orang	500,000	1,000 orang	2,200,000	DPMD		
					Peningkatan Efektivitas Penyaluran Dana Desa	Jumlah Desa yang menerima Dana Desa	381 Desa	381 Desa	800,000	381 Desa	1,000,000	381 Desa	1,000,000	381 Desa	1,100,000	381 Desa	1,100,000	381 Desa	1,200,000	381 Desa	6,200,000	DPMD	
					Pengadaan Sarana Prasarana Desa	Jumlah Sarana Prasarana Desa yang tersedia	-	10 Unit	200,000	10 Unit	200,000	10 Unit	200,000	10 Unit	250,000	10 Unit	250,000	10 Unit	300,000	50 Unit	1,400,000	DPMD	
					Peningkatan Keberdayaan Desa-Desa Perbatasan	Jumlah Desa-Desa yang meningkat Infrastrukturnya	-	1 Desa	100,000	2 Desa	200,000	2 Desa	200,000	2 Desa	250,000	2 Desa	250,000	2 Desa	300,000	10 Desa	1,300,000	DPMD	
					Penyusunan Rancangan Perbup Dana Desa dan alokasi dana desa	Jumlah Revisi Perda Tentang Desa	-	-	1 perda	50,000	1 perda	50,000	1 perda	60,000	1 perda	60,000	1 perda	60,000	5 perda	280,000	DPMD		
					Bimbingan teknis Administrasi desa	Jumlah perangkat desa yang dilatih	-	-	75 orang	100,000	75 orang	100,000	75 orang	120,000	75 orang	120,000	75 orang	130,000	375 orang	570,000	DPMD		
					Dukungan Manajemen partisipatif	Jumlah peserta workshop pemberdayaan masyarakat	-	-	141 orang	150,000	150 orang	160,000	100 orang	160,000	100 orang	160,000	100 orang	160,000	591 orang	790,000	DPMD		
					Dukungan Manajemen TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) dan BSMSS	Jumlah Kecamatan yg terfasilitasi koordinasinya antara TNI, Pemuda dan masyarakat	-	-	3 Kec	700,000	15 Kec	3,500,000	DPMD										
					Penyelenggaraan bulan Bhakti Gotong royong Masyarakat (BBGRM)	Jumlah Kecamatan yg melaksanakan Penilaian, pencanangan BBGRM Kabupaten, Provinsi dan Nasional	-	-	47 Kec	270,000	47 Kec	300,000	47 Kec	300,000	47 Kec	300,000	47 Kec	400,000	47 Kec	1,570,000	DPMD		
					Penyelenggaraan Pra Musrenbang Desa	Jumlah Desa yang mengikuti Desiminasi pramusrenbang Desa	-	-	381 Desa	315,000	381 Desa	350,000	381 Desa	350,000	381 Desa	400,000	381 Desa	400,000	381 Desa	1,815,000	DPMD		
					Program Terpadu pemberdayaan Masyarakat/PAP PNPM GSC	Jumlah kegiatan Program terpadu Pemberdayaan masyarakat yg terlaksana	-	-	11 Kegiatan	200,000	11 Kegiatan	250,000	11 Kegiatan	250,000	11 Kegiatan	300,000	11 Kegiatan	300,000	55 Kegiatan	1,300,000	DPMD		
					Pembangunan Gedung Baru Kantor DPMD Kabupaten Sukabumi	Jumlah Gedung Baru DPMD Kab. Sukabumi yg terbangun	1 gedung	-	1 gedung	4,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	1 gedung	4,000,000	DPMD		
					Pembangunan/ Rehab Kantor Desa	Jumlah Kantor Desa yang terbangun	30 Desa	2 Desa	200,000	2 Desa	200,000	2 Desa	200,000	2 Desa	250,000	2 Desa	250,000	2 Desa	300,000	2 Desa	1,400,000	DPMD	
					Sinergitas Peran Pelaku Lembaga Masyarakat	Cakupan Sinergitas antara Peran Pelaku Lembaga Masyarakat Desa	-	-	50 Desa	100,000	50 Desa	150,000	50 Desa	200,000	50 Desa	250,000	50 Desa	300,000	50 Desa	1,000,000	DPMD		
					Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Desa	Jumlah Lembaga Masyarakat Desa yang berdaya	-	-	10 klpk	500,000	10 klpk	2,500,000	DPMD										
					Penguatan Pokjanal Posyandu	Jumlah Peningkatan Kapasitas Posyandu desa	-	47 Posyandu	400,000	47 Posyandu	400,000	47 Posyandu	450,000	47 Posyandu	500,000	47 Posyandu	550,000	47 Posyandu	600,000	47 Posyandu	2,900,000	DPMD	
					Pengembangan Pelayanan Sosial Dasar	Jumlah Desa yang meningkatkan Pelayanan Sosial Dasarnya	-	-	5 Desa	500,000	25 Desa	2,500,000	DPMD										

Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja PD Penanggungjawab	Lokasi
								Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi kinerja akhir Renstra PD			
								target	Rp. (000)	target	Rp. (000)	target	Rp. (000)	target	Rp. (000)	target	Rp. (000)	target	Rp. (000)	target	Rp. (000)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	22	23
					Penguatan Kelembagaan Masyarakat	Jumlah Kelembagaan Masyarakat yg menguat	-	-	-	3 klpk	150,000	3 klpk	200,000	3 klpk	250,000	3 klpk	300,000	3 klpk	300,000	3 klpk	1,200,000	DPMD	
Meningkatkan Kapasitas Lembaga dan kemandirian Usaha Ekonomi Mikro Pedesaan	Kemandirian Ekonomi Mikro pedesaan	Meningkatnya Manajemen Pengelolaan BUMDesa	Tingkat Pengelolaan Manajemen BUMDesa		Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	Persentase BUMDesa yang berkembang	100	1.31	850,000	2.62	1,150,000	2.62	1,200,000	2.62	1,300,000	2.62	1,500,000	2.62	1,600,000	14.44	7,600,000	DPMD	
		Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Usaha Ekonomi Desa	Cakupan Pemberdayaan Lembaga Usaha Ekonomi Desa			Persentase Usaha Ekonomi Desa yang mandiri		0.52	550,000	0.52	2,150,000	0.52	1,750,000	0.52	1,750,000	0.52	1,950,000	0.52	2,000,000	3.15	10,150,000	DPMD	
					Bimbingan Teknis usaha budidaya tanaman	Jumlah Kelompok yang dilatih Budidaya tanaman	-	-	-	10 Klpk	200,000	5 Klpk	100,000	30 Klpk	600,000	DPMD							
					Bimbingan Teknis Manajemen Badan Usaha Milik Desa	Jumlah BUMDesa yang dilatih	-	100 orang	250,000	100 orang	250,000	100 orang	300,000	100 orang	300,000	150 orang	400,000	150 orang	400,000	700 orang	1,900,000	DPMD	
					Bimbingan Teknis Usaha Industri Kerajinan	Jumlah Kelompok yang dilatih Industri Kerajinan	-	-	-	10 Klpk	200,000	5 Klpk	100,000	30 Klpk	600,000	DPMD							
					Bimbingan Teknis Usaha Pertanian dan Perlemakan	Jumlah Kelompok yang dilatih	-	-	-	10 Klpk	200,000	5 Klpk	100,000	30 Klpk	600,000	DPMD							
					Peningkatan permodalan bagi usaha mikro kecil dan menengah di pedesaan	Jumlah Kelompok yang diberikan stimulan modal	-	-	-	5 Klpk	200,000	2 Klpk	50,000	13 Klpk	400,000	DPMD							
					Peningkatan kemitraan swasta dan usaha mikro kecil dan menengah di pedesaan	Jumlah Kelompok yang bermitra	-	-	-	1 Klpk	100,000	5 Klpk	500,000	DPMD									
					Bimbingan Teknis perempuan di pedesaan dalam bidang usaha ekonomi produktif	Jumlah peserta yang dilatih usaha ekonomi produktif	-	-	-	50 orang	100,000	50 orang	100,000	50 orang	100,000	100 orang	200,000	100 orang	200,000	350 orang	700,000	DPMD	
					Pemanfaatan Potensi Lokal Desa	Jumlah Kelompok yang dibina	-	-	-	3 Klpk	100,000	1 Klpk	50,000	7 Klpk	300,000	DPMD							
					Pembentukan Kelembagaan Pos Pelayanan Teknologi (POSYANTEK)	Jumlah Pembentukan Kelembagaan POSYANTEK di TK Kecamatan	5 Kec	1 Kec	100,000	1 Kec	100,000	1 Kec	150,000	1 Kec	150,000	1 Kec	200,000	1 Kec	200,000	6 Kec	900,000	DPMD	
					Pemanfaatan dan Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG)	Jumlah Desa yang mengikuti Gelar TTG	15 Klpk	5 Klpk	450,000	5 Klpk	450,000	5 Klpk	500,000	5 Klpk	500,000	5 Klpk	550,000	5 Klpk	600,000	30 Klpk	3,050,000	DPMD	
					Penguatan Perekonomian Mikro Pedesaan	Jumlah Desa yang dibina perekonomian mikronya	381 Desa	100 Desa	500,000	100 Desa	500,000	100 Desa	600,000	100 Desa	700,000	100 Desa	800,000	100 Desa	900,000	381 Desa	4,000,000	DPMD	
					Pengembangan Pasar Desa	Jumlah Pasar Desa yang berkembang	23 Desa	1 Desa	100,000	3 Desa	300,000	1 Desa	100,000	8 Desa	800,000	DPMD							
					Peningkatan Sarana Prasarana Perdagangan	Jumlah Desa yang mendapat bantuan Sarana Prasarana Perdagangan	-	-	-	1 Desa	100,000	4 Desa	400,000	DPMD									
					Pengembangan Kawasan Pedesaan	Jumlah Kawasan Pedesaan yang berkembang	-	-	-	1 Kawasan	500,000	5 Kawasan	2,500,000	DPMD									
					Dukungan Manajemen Kerjasama Antar Desa	Jumlah Desa yang melaksanakan Kerjasama	-	-	-	5 Desa	100,000	25 Desa	500,000	DPMD									

Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja PD Penanggungjawab	Lokasi	
								Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi kinerja akhir Renstra PD				
								target	Rp. (000)	target	Rp. (000)	target	Rp. (000)	target	Rp. (000)	target	Rp. (000)	target	Rp. (000)	target	Rp. (000)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	22	23	
Membangun budaya partisipasi masyarakat	Partisipasi masyarakat	Meningkatnya budaya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Cakupan partisipasi masyarakat dalam pembangunan		Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Persentase kelompok masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan	52.49	52.49	2,500,000	52.49	2,500,000	52.49	2,900,000	52.49	3,000,000	52.49	3,300,000	52.49	3,400,000	52.49	17,600,000	DPMD		
					Pelaksanaan Sosialisasi Pra Musrenbang Desa	Jumlah Desa yang Berpartisipasi dalam Musrenbangdes	381 desa	381 desa	500,000	381 desa	500,000	381 desa	560,000	381 desa	560,000	381 desa	600,000	381 desa	600,000	381 desa	3,300,000	DPMD		
					Pemberian stimulan pembangunan desa	Jumlah Desa yang mendapatkan stimulan pembangunan desa	-	-	-	-	1 desa	100,000	4 desa	400,000	DPMD									
					Peningkatan Efektivitas Penyaluran Bantuan Provinsi	Jumlah Desa yang mendapat Bantuan Provinsi	381 Desa	381 Desa	250,000	381 Desa	250,000	381 Desa	300,000	381 Desa	300,000	381 Desa	350,000	381 Desa	350,000	381 Desa	1,800,000	DPMD		
					Dukungan Manajemen TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) dan BSMS	Jumlah Masyarakat yang berpartisipasi Swadaya Gotong-royong Masyarakat dengan TNI	10 desa	2 Desa	200,000	2 Desa	200,000	2 Desa	250,000	2 Desa	250,000	2 Desa	300,000	2 Desa	300,000	10 Desa	1,500,000	DPMD		
					Peningkatan Peranserta Masyarakat melalui TMMD (Banprov)	Jumlah Masyarakat yang berpartisipasi Swadaya Gotong-royong Masyarakat dengan TNI	5 desa	1 Desa	150,000	1 Desa	150,000	1 Desa	150,000	1 Desa	150,000	1 Desa	150,000	1 Desa	150,000	1 Desa	900,000	DPMD		
					Peningkatan Peranserta Masyarakat melalui BSMS (Banprov)	Jumlah Masyarakat yang berpartisipasi Swadaya Gotong-royong Masyarakat dengan TNI	5 desa	1 Desa	100,000	1 Desa	100,000	1 Desa	100,000	1 Desa	100,000	1 Desa	100,000	1 Desa	100,000	1 Desa	600,000	DPMD		
					Penyelenggaraan Bulan Bhsadi Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)	Jumlah Masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan Gotong-royong	5 desa	100%	300,000	100%	300,000	100%	350,000	100%	350,000	100%	400,000	100%	400,000	100%	2,100,000	DPMD		
					Dukungan Manajemen Partisipatif PNPMD GSc	Jumlah Desa yang terkelola	47 Kec	47 Kec	1,000,000	47 Kec	1,000,000	47 Kec	1,100,000	47 Kec	1,200,000	47 Kec	1,300,000	47 Kec	1,400,000	47 Kec	7,000,000	DPMD		

Palabuhanratu,

2017

Kepala Dinas,



ADE SETIAWAN, SIP

Pembina Utama Muda, IV/c

NIP. 19630603 198503 1 021

BAB VI

INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Tujuan penetapan indikator kinerja daerah adalah dalam rangka memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah pada akhir periode kinerja yaitu tahun 2021, khususnya dalam mengukur keberhasilan capaian target kinerja selama 5 (lima) tahun. Indikator kinerja perangkat daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan (*out-comes*). Suatu indikator kinerja perangkat daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (*outcome*) terhadap tingkat capaian indikator kinerja perangkat daerah berkenaan setelah program prioritas ditetapkan.

Indikator kinerja DPMD Kabupaten Sukabumi yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai DPMD Kabupaten Sukabumi dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-2021. Indikator kinerja DPMD Kabupaten Sukabumi mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Sukabumi ini sebagaimana tertuang dalam **Tabel 6.1** yaitu sebagai berikut :

Tabel 6.1
Indikator Kinerja DPMD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran
RPJMD Kabupaten Sukabumi Tahun 2016 - 2021

No.	URUSAN / INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RENSTRA	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa									
22.1	Swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat	%	81	81	81	81	81	81	81	81
22.2	Persentase aparatur desa yang mendapat pembinaan	%	200 (75 orang)	39,37 (150 orang)	52,49 (200 orang)	52,49 (200 orang)	65,62 (250 orang)	65,62 (250 orang)	52,49 (200 orang)	54,68 (1.250 orang)
22.3	Cakupan sarana dan prasarana perkantoran Pemerintahan Desa yang baik	%	1,31 (5 orang)	1,31 (5 orang)	1,31 (5 orang)	1,31 (5 orang)	1,31 (5 orang)	1,31 (5 orang)	1,31 (5 orang)	7,87 (30 orang)
22.4	Persentase kelembagaan masyarakat / organisasi masyarakat pedesaan	%	3,67 (14 kelompok)	1,31 (5 Kelompok)	1,31 (5 Kelompok)	1,31 (5 Kelompok)	1,31 (5 Kelompok)	1,31 (5 Kelompok)	1,31 (5 Kelompok)	7,87 (30 kelompok)

No.	URUSAN / INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RENSTRA	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	yang dibina									
22.5	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yang berprestasi	Klpk	5	1	1	1	1	1	1	6
22.6	Persentase Desa yang administrasinya terkelola dengan baik	%	6,56 (25 Desa)	1,31 (5 Desa)	1,31 (5 Desa)	1,31 (5 Desa)	1,31 (5 Desa)	1,31 (5 Desa)	1,31 (5 Desa)	7,87 (30 Desa)
22.7	Jumlah Desa Sangat Tertinggal dan Tertinggal yang statusnya meningkat	Desa	111	2	2	2	2	2	2	12
22.8	Persentase BUMDesa yang berkembang	%	100 (381 Desa)	1,31 (5 Desa)	2,62 (10 Desa)	2,62 (10 Desa)	2,62 (10 Desa)	2,62 (10 Desa)	2,62 (10 Desa)	14,44 (55 desa)
22.9	Persentase Lembaga Usaha Ekonomi Desa yang mandiri	%	0,52 (2 kelompok)	0,52 (2 kelompok)	0,52 (2 kelompok)	0,52 (2 kelompok)	0,52 (2 kelompok)	0,52 (2 kelompok)	0,52 (2 kelompok)	3,15 (12 kelompok)
22.10	Persentase kelompok masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan	%	52,49 (200 kelompok)	52,49 (200 kelompok)	52,49 (200 kelompok)	52,49 (200 kelompok)	52,49 (200 kelompok)	52,49 (200 kelompok)	52,49 (200 kelompok)	52,49 (1.200 kelompok)

BAB VII PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-2021 merupakan dokumen perencanaan periode 5 (lima) tahunan yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai tugas pokok dan fungsi DPMD Kabupaten Sukabumi serta disusun dengan memperhitungkan seluruh potensi dan kebutuhan (kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan).

Renstra DPMD Kabupaten Sukabumi tahun 2016-2021 merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Sukabumi tahun 2016-2021 dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) DPMD Kabupaten Sukabumi yang menjadi dokumen perencanaan tahunan sebagai penjabaran dari Renstra DPMD Kabupaten Sukabumi.

Pelaksanaan Renstra ini sangat memerlukan partisipasi, semangat, dan komitmen yang kuat dari seluruh pegawai DPMD, karena akan menentukan keberhasilan pencapaian kinerja program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian, Renstra ini tidak hanya menjadi dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan pencerminan aspirasi pembangunan yang memang dibutuhkan oleh seluruh *stakeholders* sesuai dengan visi dan misi Kabupaten Sukabumi yang ingin dicapai.

BUPATI SUKABUMI,



Drs. H. MARWAN HAMAMI, MM.